LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2021

PEMERINTAH KAPUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
Sumber 45611

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT. kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk periode tahun 2020 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi tentang informasi kinerja Dinas Pendidikan mengenai pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan secara baik, benar, akuntabel, efesien, responsif terhadap aspirasi masyarakat / publik dan menjadi masukan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, guna menjadikan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mendapat kepercayaan dari seluruh stakeholder.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan merupakan sarana pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun yakni tahun 2020 serta merupakan tolok ukur untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misinya.

Demikian Laporan Hasil Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebagai bahan pertimbangan bagi instansi berwenang yang mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil akuntabilitas kinerja bidang pendidikan.

Cirebon, Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

Drs. H. ASDULLAH,SA,MM
Nip. 19640203 199009 1 001

DAFTAR ISI

			HALAMAN
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR LAMPIRAN			iii
IKHTISAR EKSEKUTIF			1
BAB I	PENDAHULUAN		3
	A	Gambaran Umum Unit Kerja	3
	B	Struktur Organisasi	7
	C	Tugas Pokok Dan Fungsi	8
	D	Lingkungan Strategis	23
	E	Sistematika Penyajian	48
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020		33
	A	Visi - Misi	33
	B	Tujuan	36
	C	Sasaran Strategis	38
	D	Indikator Kinerja Utama (IKU)	47
	E	Penetapan Kinerja Tahun 2020	48
BAB.III		AKUNTABILITAS KINERJA	50
	A	Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja	50
	B	Pengukuran Dan Analisa Kinerja	52
	C	Pembandingan Capaian Kinerja	65
	D	Akuntabilitas Keuangan	71
	E	Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran	72
BAB IV	PENUTUP		86

DAFTAR LAMPIRAN

1. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (TARGET DAN REALISASI) TAHUN 2020
2. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (REALISASI) TAHUN 2019 DAN 2020
3. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (REALISASI AKUMULASI) TAHUN 2020
4. REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2020) DENGAN RENCANA SESUAI RENSTRA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2020 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, serta pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2020 yang didasari oleh Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2019-2024. Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Akuntabilitas ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan Kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2020 telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan. Rata-rata capaian Kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2020 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut :

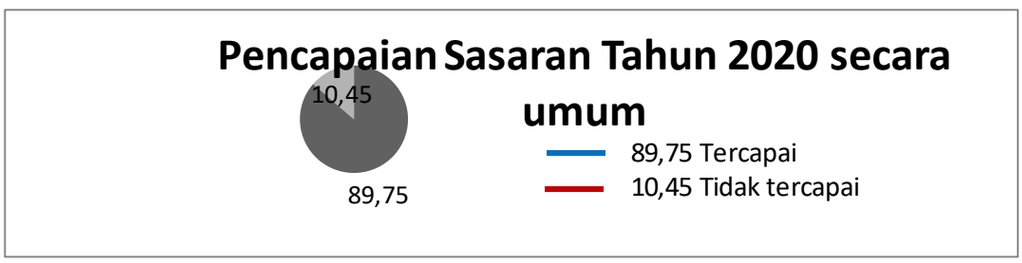

Dari tabel diatas terlihat 89,75% mencapai target/meningkat dan 10,45% tidak mencapai target. Sedangkan berdasarkan perubahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2020, Anggaran Dinas Pendidikan untuk belanja langsung sebesar Rp. **309.743.451.943**,- dan realisasi sebesar Rp. 63.603.895.163,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp.245.982.042.396 hal ini karena adanya Pagu Dana BOS APBN untuk SD dan SMP sebesar Rp 244.436.199.443,- yang hanya merupakan pencatatan Income Anggaran dari Pusat Masuk ke Daerah, sedangkan pengelolaan keuangannya langsung ditransper dari Pengelola Dana BOS Kemendikbud ke Rekening Sekolah

masing-masing. Sehingga dalam laporan daya serap dinas pendidikan tidak menyajikan dalam LRA tetap laparoan langsung melalui PPKAD.

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada tahun 2020 dan seterusnya harus terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan *upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah* melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan.

Sumber, Februari 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Drs. H ASDULLAH SA,MM
Nip. 19640203 199009 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM UNIT KERJA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kesejahteraan masyarakat yang diadopsi oleh Pemerintah dari konsep UNDP yang menunjukkan laju perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. IPM dibentuk atas dasar 3 (tiga) komponen, yaitu Indeks Pendidikan (IP), Indeks Kesehatan (IK), dan Indeks Daya Beli (IDB). Masing-masing komponen memberikan tingkat kontribusi yang sama terhadap besaran IPM.

Pemerintah Kabupaten Cirebon konsisten menggunakan IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat, dan berharap mampu mencapai angka IPM 76,74 pada tahun 2019. Untuk setiap kenaikan 1 (satu) angka IPM diperlukan perubahan paradigma, baik dalam aspek manajemen, kinerja aparatur, budaya kerja, dan penyediaan anggaran biaya. Untuk mencapai target IPM tersebut perlu adanya upaya-upaya strategis untuk mengakselerasi pencapaiannya.

Pembangunan pendidikan harus dilakukan secara lintas sektoral dan terpadu antar instansi pemerintah serta antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Untuk itu perlu dikembangkan iklim pembangunan pendidikan yang memungkinkan bagi setiap komponen pemerintahan maupun masyarakat untuk bisa secara bersama-sama membahas pendidikan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya masing-masing.

Masalah-masalah teknis non-kependidikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan antara lain komunikasi, transportasi, sosial budaya, dan sosial ekonomi Penanganannya perlu dilakukan secara lintas sektoral, agar pemerataan pendidikan dan pemberian pelayanan pendidikan minimal bagi masyarakat bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu komponen IPM adalah indek pendidikan, sedangkan RLS dan HLS merupakan indikator dalam pencapaian indek pendidikan. Dengan demikian perlu adanya data yang lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan tentang jumlah penduduk usia sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana, karena semua itu saling terkait dalam meningkatkan RLS dan HLS sehingga pada gilirannya dapat mendongkrak IPM sesuai target yang ditetapkan.

1. Jumlah penduduk usia sekolah

Penduduk Kabupaten Cirebon berjumlah 2,209,870 orang, laki-laki 1,118,225 Orang dan perempuan 1,091,645 orang tersebar di 40 Kecamatan / 400 desa dan 12 Kelurahan. Dari jumlah tersebut penduduk usia sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SM sumber data Disdukcapil tahun 2020 sebanyak 416.002 orang terdiri dari laki-laki 214.457 orang dan perempuan 201.545 orang.

Penduduk Usia Prasekolah – Sekolah Menengah Pertama

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	04-06	75,334	70,155	145,489
2	07-12	100,746	94,631	195,377
3	13-15	38,377	36,759	75,136
Jumlah		214,457	201,545	416,002

Sumber data : Disdukcapil 2020

Kondisi ekonomi keluarga (*berdasarkan data tahun 2016 Buku Profl Sosial Budaya sumber dari Bappeda Kabupaten Cirebon*) Cakupan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I masih sangat tinggi mencapai 57,60% yang menggambarkan keluarga belum sejahtera masih sangat tinggi di Kabupaten Cirebon

2. Jumlah peserta didik

Banyak sedikitnya jumlah peserta didik berpengaruh langsung pada tingkat capaian RLS sekaligus tingkat capaian APK, APM pada semua jenjang pendidikan. Dengan demikian perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk terus meningkatkan jumlah peserta didik pada semua jenjang.

Jumlah Peserta Didik

No	Jenjang	Formal	Non Formal	Jumlah
1	PAUD	32,611	13,342	45,953
2	SD/Sederajat	226,585	488	227,073
3	SMP/Sederajat	143,385	2,842	146,227
Jumlah		402,581	16,672	419,253

Sumber data : Profil Pendidikan 2020/2021

3. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan

Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diperlukan tenaga pendidik dan kependidikan dengan jumlah yang memadai. Saat ini jumlahnya masih sangat kurang atau belum sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan sehingga mayoritas sekolah mengangkat tenaga honorer untuk menutup kebutuhan tersebut. Selain itu masih terdapat berbagai

masalah yang berkaitan dengan kondisi guru, antara lain ; (1) adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, (2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan guru yang belum memadai. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut dibawah ini dapat dilihat jumlah tenaga penndidik dan kependidikan di Kabupaten Cirebon.

Jumlah Tenaga Pendidik

No	Jenjang	Formal	Non Formal	Jumlah
1	PAUD	2,991	1,167	4,158
2	SD/Sederajat	11,224	243	11,467
3	SMP/Sederajat	8,057	299	8,356
Jumlah		22,272	1,709	23,981

Sumber data : Profil Pendidikan 2020/2021

4. Jumlah sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mutlak diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah maupun kwalitasnya. Saat ini yang terlihat jelas adalah masih kurangnya daya tampung apabila dibandingkan antara rasio jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak pada rendahnya APK, APM di Kabupaten Cirebon.

Jumlah lembaga/Sekolah dan Ruang Kelas

No	Jenjang	Formal	
		Lembaga	R. Kelas
1	PAUD	569	1,996
2	SD, MI	1,080	23,249
3	SMP, SMPT, MTS	322	3,788
Jumlah		1,971	29,033

Sumber data : Profil Pendidikan 2020/2021

5. Manajemen pengelolaan pendidikan

Seiring bergulirnya era otonomi daerah dimana terdapat pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sehingga membawa nuansa baru dalam sistem pengelolaan pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Otonomi pendidikan memerlukan profesionalisme pengelolaan manajemen baik tingkat Kabupaten , kecamatan maupun tingkat sekolah. Sebagian besar pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen pendidikan di Kabupaten Cirebon sudah

berjalan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kinerja manajemen birokrasi pendidikan masih dirasa kurang sehingga tingkat efisien dan efektifitasnya masih rendah. Kurang tersedia data pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel, untuk itu perlu secepatnya dibangun sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara Dinas sampai ke sekolah-sekolah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang handal.

Otonomi Daerah juga berdampak pada pengelolaan manajemen ditingkat sekolah yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau school based management. Saat ini seluruh sekolah di Kabupaten Cirebon telah melakasanakan MBS ditandai dengan adanya beberapa prinsip umum yang patut menjadi pedoman dalam pelaksanaan MBS diantaranya : sekolah telah memiliki visi, misi dan strategi kearah pencapaian mutu pendidikan, melibatkan partisipasi masyarakat, terbentuknya Komite Sekolah serta adanya transparansi dan akuntabilitas dimana sekolah beserta Komite Sekolah merupakan institusi terdepan yang paling bertanggungjawab dalam pengeloaan sekolah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

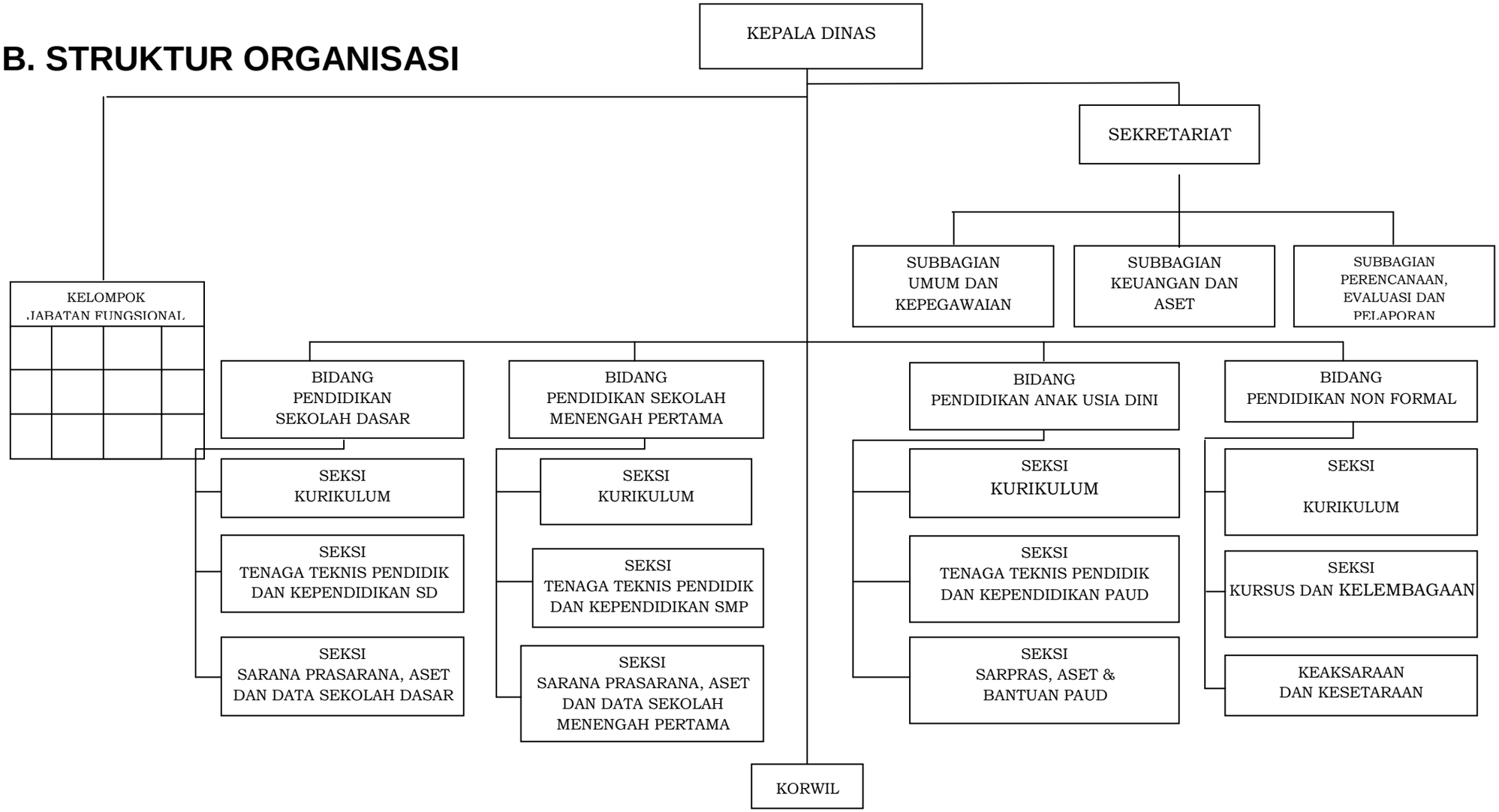

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 Nomor Seri D 13), susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

(1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang pendidikan;
b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pendidikan,
c. perencanaan dan pengendalian anggaran Dinas;
d. pengendalian urusan administrasi Dinas;
e. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang pendidikan, (PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal) sesuai aturan yang berlaku;
f. penyelenggaraan dan pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun;
g. pengendalian bidang pendidikan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan lingkup tugas;
h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama Bidang pendidikan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
i. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang pendidikan, serta UPT sesuai dengan lingkup tugas;
j. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pendidikan.

2. SEKRETARIAT

(1) Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana kerja/program Sekretariat;
b. penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Dinas;
c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
d. pengendalian dan pengelolaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan kepegawaian Dinas;
e. pengelolaan perlengkapan dan sarana kerja dan aset Dinas dan UPT Pendidikan Kecamatan;
f. pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas;
g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
h. pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik;
i. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
j. Pengelolaan web site Dinas;
k. pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai unsur staf yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan sarana kerja/aset, keuangan, dan program/rencana kerja Dinas.

2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program Subbag Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan umum dan ketatalaksanaan dinas;
c. pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kearsipan Dinas;
e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
f. pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, sarana dan rumah tangga Dinas dan UPT Pendidikan Kecamatan;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, sarana, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.

2.2 Subbagian Keuangan dan Aset

(1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan dan aset;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
d. pelaksanaan verifikasi SPP;
e. penyiapan surat perintah membayar;
f. pelaksanaan verifikasi;
g. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
h. penyusunan laporan keuangan Dinas;
i. pelaksanaan penatausahaan (pencatatan dan pelaporan) barang/asset Dinas;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan serta pencatatan/pelaporan barang/aset Dinas.

3.3 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pengoordinasian perencanaan program Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Dinas;

b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja (Dinas;
c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas;
e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
f. pengelolaan data dan informasi Dinas;
g. pengelolaan sistem informasi/ web site Dinas;
h. penyusunan profil Dinas;
i. penyusunan laporan Dinas;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

3. BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

(1) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi;
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar (kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar);
b. perumusan rencana dan program kerja bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
c. perumusan norma, standar operasional, kriteria, pedoman dan prosedur pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
e. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
f. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar (SD);

g. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dan sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar;
h. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok mengelola (merumuskan, menyusun dan melaksanakan) kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan Sekolah Dasar.

3.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Sekolah Dasar;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan Sekolah Dasar;
d. pengelolaan kalender pendidikan Sekolah Dasar;
e. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan Sekolah Dasar;
f. pembinaan teknis perpustakaan dan laboratorium sekolah bagi pendidikan SD;
g. pelaksanaan dan pembinaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Sekolah Dasar;
h. pembinaan prestasi gugus Pendidikan Sekolah dasar;
i. pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
j. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta didik/siswa baru, mutasi siswa pendidikan Sekolah Dasar
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum pendidikan sekolah dasar.

3.2 Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan kependidikan Sekolah Dasar;
b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada pendidikan Sekolah Dasar (SD);
c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar sesuai kewenangannya ;
d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan Sekolah Dasar;
e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
i. pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah dasar;

3.3 Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;
   b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SD;
   c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;
   d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan Sekolah Dasar;
   e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SD;
   f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana/aset pendidikan sekolah dasar;
   g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset sekolah dasar;
   h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
   i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, mengkaji, dan memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana serta penatausahaan/pencatatan aset pendidikan SD.

4. BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

(1) Bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) (kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data SMP);
   b. perumusan rencana dan program kerja/kegiatan bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
   c. perumusan norma, standar operasional, kriteria, pedoman dan prosedur pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
   d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama (SMP)
   e. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

f. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data sekolah menengah pertama(SMP);
g. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
h. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas pokok menyusun, mengelola dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

4.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
d. pengelolaan kalender pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
e. pembinaan teknis perpustakaan dan laboratorium sekolah bagi pendidikan SMP
f. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
g. pelaksanaan dan pembinaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
h. pembinaan prestasi gugus Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
i. pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
j. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta didik/siswa baru, mutasi siswa pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

4.2 Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan kependidikan SMP;
b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP;
c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP sesuai kewenangannya;
d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan SMP;
e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan SMP;
f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan SMP;
g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan SMP;
h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP;
i. pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan Kependidikan SMP;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi tenaga pendidik dan kependidikan SMP; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan SMP, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP.

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan SMP.

4.3 Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data SMP

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data SMP mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;
b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan SMP;
e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana/aset pendidikan SMP;
g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset SMP;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan SMP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP.

(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP mempunyai tugas pokok tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, mengkaji, dan memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan SMP.

5. BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
c. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini;
d. penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok mengelola urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan anak usia dini.

5.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunankebijakan teknis kurikulum pendidikan PAUD;
c. pembinaan teknis sarana bermain bagi pendidikan PAUD;
d. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan PAUD;
e. pengelolaan kalender pendidikan PAUD;
f. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan PAUD;
g. pembinaan prestasi gugus PAUD;
h. pembinaanminat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD;
i. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta didik/siswa baru, mutasi siswa PAUD;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan PAUD sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.

5.2 Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD mempunyai fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan kependidikan PAUD;
   b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada pendidikan PAUD;
   c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD sesuai kewenangannya ;
   d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan PAUD;
   e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
   f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
   g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan PAUD;
   h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD;
   i. pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan Kependidikan PAUD;
   j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD; dan
   k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan PAUD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan PAUD.

5.3 Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;

b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan PAUD;
c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD;
d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan PAUD;
e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan PAUD;
f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana/aset pendidikan PAUD;
g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset PAUD;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PAUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PAUD melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun rencana, mengelola dan engolah data, mengiventarisasi, memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana/aset PAUD.

6. BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL

(1) Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:
a) perumusan kebijakan teknis kurikulum, keaksaraan dan kesetaraan, dan kursus dan kelembagaan bidang Pendidikan Non Formal;
b) pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang pendidikan Non Formal;
c) penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Non Formal;
d) penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Non Formal;
e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang pendidikan Non Formal;
f) pelaporan pelaksanaan kegiatan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Non Formal;
g) pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok mengelola, melaksanakan urusan/kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan Non Formal.

6.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Non Formal;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan Non Formal;
d. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar Paket C setara SMA dan Keaksaraan;
e. pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
f. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
g. pelaksanaan pembinaan Tutor Kejar Paket A, Paket B dan Paket C;
h. pelaksanaan ujian nasional Kejar Paket A, Paket B dan Paket C dan keaksaraan;
i. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
j. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
k. pelaksanaan kompetensi pendidik dan Kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kurikulum Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
m. pengelolaan kalender pendidikan Non Formal;
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum Pendidikan Non Formal.

6.2 Seksi Kesetaraan Dan Keaksaraan

(1) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan Mempunyai Fungsi :

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi;
b. penyusunan kebijakan teknis Kesetaraan dan Keaksaraan;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan Kesetaraan dan Keaksaraan
d. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
e. penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, program Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
g. pelaksanaan lomba pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

(3) Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan keaksaraan dan kesetaraan.

6.3 Seksi Kursus dan Kelembagaan

(1) Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi;

b. penyusunan kebijakan teknis kursus dan kelembagaan;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kursus dan kelembagaan;
d. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
e. pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
f. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
g. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan kursus dan kelembagaan;
h. penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian kursus dan kelembagaan;
i. pelaksanaan lomba pada lembaga kursus dan kelembagaan berprestasi;
j. pelaksanaan monitoring kompetensi pada lembaga kursus; dan
k. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan lembaga kursus dan kelembagaan;

(2) Seksi Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Non Formal melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok tugas pokok melaksanakan, menyusun rencana, mengelola dan mengolah data, pembinaan kursus dan kelembagaan di Bidang Pendidikan Non Formal.

D. LINGKUNGAN STRATEGIS

1.1. TELAAHAN KEBIJAKAN

1. PERMASALAHAN

Pendidikan menjadi penentu kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Cirebon adalah rata-rata pendidikan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Cirebon masih berkisar pada 6,74 tahun. Ini menunjukkan tingkat melanjutkan sekolah masih rendah terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar masih belum tuntas. Dari sisi fasilitas gedung sekolah, Kabupaten Cirebon masih menghadapi kondisi ruang kelas yang membutuhkan banyak perbaikan.

Sementara, dari aspek ketersediaan tenaga pendidik, Kabupaten Cirebon masih menyisakan tenaga pendidik yang kompetensinya masih rendah. Berdasarkan uraian di atas, pembangunan daerah untuk mengejar ketertinggalan akan semakin sulit jika pembangunan sumber daya manusia tidak segera dilakukan percepatan perbaikan melalui pembangunan pendidikan.

2. TELAAHAN VISI MISI KEPALA DAERAH

Visi misi dalam pembangunan Kabupaten Cirebon perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan yang spesifik. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang *inherent.* Kebijakan umum tersebut diantaranya: 2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

3. TELAAHAN VISI MISI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Jawa Barat khusus bidang pendidikan yang akan dilaksanakan selama 2019 – 2024 adalah tercantum pada misi "**Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif"**

Strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat guna mencapai tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pendidikan tetap mengerucut pada tiga hal yakni Peningkatan Aksesbilitas Pendidikan, Mutu Pendidikan serta Tata Kelola Pendidikan yang akuntabel dan transparansi.

4. TELAAHAN VISI MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Landasan pembangunan pendidikan di Indonesia mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yakni **"Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif di tahun 2025".** Makna insan yang cerdas yakni ditinjau berdasarkan spiritual, emosional dan social serta intelektual. Kondisi tersebut dinilai masih relevan dengan kondisi saat ini. Visi Kementrian dan Kebudayaan di tahun 2019 yakni **"Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong-royong"**.

Untuk mewujudkan visi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 maka disusun beberapa misi diantaranya mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan,

mewujudkan pembelajaran yang bermutu, mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Makna dari misi diatas dapat diartikan sebagai berikut:

a. Mewujudkan Pelaku pendidikan yang kuat yakni meningkatkan Guru, Siswa dan Tenaga Kependidikan dalam pelestarian dan pengembangan budaya serta diarahkan pada perilaku yang mandiri.

b. Mewujudkan akses yang meluas, merata yakni mengoptinalkan layanan pendidikan 12 tahun serta meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan khusus bagi pendidikan yang berkebutuhan khusus dan wilayah 3T.

c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu yakni meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional, meningkatkan percepatan mutu pendidikan dalam menghadapi kondisi Global melalui pelayanan Inovasi Pendidikan.

d. Mewujudkan penguatan efektivitas dan kapasistas tata kelola pendidikan, mengembangkan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah, yang bersih, efektif dan efisien.

Dari Misi yang dicanangkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki hubungan erat dengan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten CIrebon dalam memberikan pelayanan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Misi kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yakni Aksesbilitas Pendidikan yang merata, Peningkatan Mutu Pendidikan serta Tata kelola pendidikan.

5. TELAAHAN RTRW

Pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

PKL Ciledug dan PKLp Losari dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Ciledug

meliputi Kecamatan Losari (PKLp); Pabedilan; Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman

PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp); Mundu; Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng

PKL Sumber dan PKLp Weru dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi; Wilayah Pelayanan PKL Sumber meliputi Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun; Kedawung; dan Gunungjati.

PKL Palimanan dan PKLp Plumbon dengan fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Palimanan meliputi Kecamatan Plumbon (PKLp); Klangenan; Jamblang; Depok; Dukupuntang; dan Gempol.

PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial.

ANALISIS

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

1.2. Analisis lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berpengaruh terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimana di dalamnya mencakup (1) sumberdaya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2.1. Kekuatan

a) Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon secara efisien dan efektif sehingga dapat berkompetisi di kancah global, hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya beberapa prestasi kejuaraan baik di dalam penguasaan mata peiajaran, seni budaya maupun prestasi olahraga di tingkat Propinsi maupun Nasional.
b) Adanya kesepakatan dari seluruh jajaran pendidikan untuk mendukung visi Kabupaten Cirebon yang dapat dijadikan Akselerator peningkatan kesejahteraan masyarakat *melalui pembinaan pendidikan yang berkualitas guna mendukung visi Kabupaten Cirebon ".* Implementasi hal tersebut tercermin dalam program dan kegiatan yang selama ini digulirkan serta anggaran pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
c) Tersedianya sumberdaya aparatur pendidik dan kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan di era globalisasi sekarang ini.
d) Tersedianya sarana dan prasarana yang siap untuk dikembangkan guna menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia global, hal ini dapat dilihat dari aset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran, gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, ketersediaan lahan yang senantiasa siap untuk dibangun dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
e) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan bahkan sampai pada tingkat Sekolah dan masyarakat siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan, pengambilan kebijakan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

1.2.2.Kelemahan

a) Belum terbangunnya koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar

lini, unit dan institusi pendidikan di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya ego sektoral serta bervariasinya kemampuan SDM aparatur maupun kemampuan daya beli masyarakat yang seringkali menjadi kendala di dalam pembangunan di bidang pendidikan.

b) Belum seragamnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyimpangan terhadap komitmen yang disepakati sehingga menjadi kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.

c) Belum efektifnya rentang kendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, hal ini disebabkan karena : (a) Penegakkan hukum tidak/kurang tegas; (b) besarnya populasi persekolahan yang harus diawasi; (c) kurangnya keterlibatan aparatur pendidikan yang ada di lapangan dalam melaksanakan pengawasan; dan (d) kurangnya dukungan dana dan fasilitas operasional.

d) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan, hal ini disebabkan karena: (a) besarnya populasi persekolahan yang tersebar sampai di pelosok desa; (b) kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan; dan (c) kurangnya dukungan dana operasional dan teknologi sehingga mengakibatkan perencanaan menjadi tidak matang dan pengawasan tidak efektif.

1.3 Analisis Lingkungan Eksternal

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan.

1.3.1 Peluang

a) Media massa elektronik maupun cetak yang berskala lokal, regional maupun nasional banyak terdapat di Kabupaten Cirebon, hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerjasama yang saling menguntungkan.

b) Adanya kepedulian masyarakat, pengusaha terhadap pendidikan dan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat (stakeholders) menyambut penerapan inovasi-inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang difasilitasi melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekoiah (MBS), Badan Akreditasi Sekoiah (BAS), *Broad Based Education (BBE) and Life Skill* serta gerakan-gerakan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan mulai dari pembentukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), kemudian menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), Dewan Pendidikan (DP)/ Dewan Sekoiah, sampai kepada Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP).

c) Posisi geografis Kabupaten Cirebon yang merupakan lintasan antar propinsi-propinsi di Indonesia memiliki nilai strategis untuk menjadi pintu gerbang dan cermin pendidikan bukan hanya pada skala propinsi tapi juga pada skala Nasional. Hai ini menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara akseleratif dan berkesinambungan.

1.3.2 Tantangan

a) Kabupaten Cirebon sebagai tempat tujuan untuk mencari kerja/nafkah Seiring pertumbuhan dunia industri mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini menjadi tugas berat jajaran pendidikan di Kabupaten Cirebon guna menuntaskan program-program pendidikan, khususnya Rintisan Wajar 12 Tahun karena semakin besarnya populasi penduduk yang harus dilayani.

b) Geografis Kabupaten Cirebon yang cukup luas dan masih terdapat beberapa daerah terpencil. Hal ini telah menyebabkan tidak meratanya penyebaran pelayanan pendidikan sehingga menjadi tantangan berat di dalam melakukan inovasi dan akselerasi pendidikan.

c) Kendala budaya tradisional dan pengaruh negatif budaya luar menimbulkan permasalahan yang kompleks di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon, hal ini menuntut penanganan tersendiri melalui pendekatan-pendekatan khusus agar pembangunan pendidikan bisa berjalan secara sinergis dan serentak. Dalam posisi pendidikan yang merupakan kebutuhan dan perhatian semua orang, menjadi primadona dalam pencapaian IPM 80 serta dibebani dampak reformasi yang kebablasan, mengakibatkan banyak pihak berkeinginan dan memaksakan diri untuk ikut campur mengawasi pelaksanaan pembangunan pendidikan tanpa mau mengerti permasalahan internal kelembagaan. Hal ini menjadi beban berat bagi jajaran pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan secara efisien dan efektif karena terlalu banyak campur tangan pihak luar terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini berdampak besar terhadap aspek psikologis para aparatur di dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan interlan mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisi lingkungan Strategis digunakan teknis analisis SWOT (Strength, Weakneess, Opportunity, dan Thereat) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

1.4 Permasalahan yang dihadapi

Semakain hari permasalahan pendidikan bukannya semakin berkurang, justru permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan tuntutan globalisasi segala penjuru kehidupan dimana filter tidak lagi dapat membendung sisi negatif dari seluruh interaksi setiap individu. Secara garis besar permasalahan pendidikan setidaknya dapat diklasifikasikan kedalam 3 pokok masalah sebagaimana uraian dibawah ini.

1.4.1 Peningkatan Akses dan pemerataan pendidikan

a) Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah ;
b) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah;
c) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
d) Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi di dimasyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;
e) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.

1.4.2 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

a) Kurang meratanya tingkat profesionalisme guru dalam strategi pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.
b) Terdapat kesenjangan fasilitas sarana penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium serta media pembelajaran lainnya belum merata pada seluruh sekolah;
c) Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
d) Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;
e) Kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan
f) Kolaborasi dalam pembaharuan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;

g) belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;
h) belum ditetapkan standar mutu yang menjadi indikator pencapaian program;
i) belum terdapat kebijakan untuk menetapkan kendali mutu yang merupakan rencana implementasi kebijakan tingkat nasional
j) Lulusan sekolah kurang memiliki ketrampilan dan kecakapan hidup;

1.4.3 penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik

a) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
b) Belum optimalnya kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG) / MGMP dan supervisi kinerja guru;
c) Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategis dan program tahunan pada tingkat sekolah belum berkembang baik;
d) Proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
e) Belum optimalnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatan mutu pengorganisasian yang lebih efektif.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN

A Gambaran Umum Unit Kerja

Dalam gambaran umum unit kerja ini menerangkan tentang keadaan dinas pendidikan

B Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dinas pendidikan

C Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi disini membahas tengang:perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pra sekolah dan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal, sarana dan prasarana serta fungsional;pelaksanaan pembinaan

administrasi ketatausahaan Dinas; penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D Lingkungan Strategis

Memuat tentang lingkungan Strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal.

E Sistematika Penyajian

Tentang peyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan secara garis besar.

BAB II PERENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

A Visi - Misi

B Tujuan

C Sasaran Srategis

D Indikator Kinerja Utama (IKU)

B Penetapan Kinerja Tahun 2020

Membahas tentang penetapan kinerja tahun 2020 sebagai pedoman dalam menjalankan kinerja dibidang pendidikan di tahun 2020

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

A Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dimana pencapaian Sasaran tersebut diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

B Pengukuran dan dan Analisa Kinerja

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya

C Pembandingan Capaian Kinerja

Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja tahunan yang direncanakan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020

D Akuntabilitas Keuangan

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

E Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran

BAB IV PENUTUP

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2019 – 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2020 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2020.

A. VISI - MISI

V I S I

Visi Dinas Pendidikan mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon dan merupakan komitmen (keinginan dan cita-cita) segenap jajaran Pengelola dan Pemerhati Bidang Pendidikan di Kabupaten Cirebon. Visi tersebut merupakan kesimpulan dari hasil serangkaian pembahasan yang melibatkan unsur-unsur pengelola dan pemerhati pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pembangunan pendidikan dirumuskan dengan sepenuhnya memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi-kondisi nyata serta permasalahan pendidikan di Kabupaten Cirebon, dan untuk pencapaiannya harus dilakukan melalui penggalian, pengerahan dan pengembangan potensi-potensi bidang pendidikan yang ada agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sehingga berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Keberhasilan pencapaian Visi dalam pembangunan di bidang pendidikan diukur dengan tingkat pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang ditandai dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pencapaian IPM di Kabupaten Cirebon.

Pemikiran-pemikiran di atas menjadi dasar pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap dunia pendidikan dalam rangka pengelolaan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Visi tersebut adalah

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”

M I S I :

Guna pencapaian visi tersebut diatas , Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;
4. Meningkatnya produktifitas masyakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengampu pada misi ke 2 (dua) misi Kabupaten Cirebon yaitu “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”

Adapun penjelasan misi tersebut terhadap pembangunan pada bidang Pendidikan di Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Pertama, Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik.

Tuntutan dunia global diantaranya layanan pendidikan yang bermutu. Kata bermutu diatas mengandung makna sangat kompleks seiring dengan kompleksnya peserta didik itu sendiri, karena salah satu tugas guru harus dapat memanusiakan manusia.

Layanan pendidikan yang bermutu meliputi 1) Sumber Daya Manusia/SDM, 2) sarana prasarana serta 3) manajemen pendidikan.

SDM pendidikan atau guru menempati posisi sangat penting dalam menjembatani tranformasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan potensi siswa sesuiai bakat, minat yang dimiliki. Oleh karena itu agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu, perlu adanya guru yang profesional ditandai dengan kualifikasi pendidikan S1, tersertifikasi, memiliki

kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Kurikulum pendidikan dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai perkembangan dan sebagai bentuk upaya penyempurnaan diberbagai bidang. Tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran berkembang terus sampai pada tahun 1984 dinamakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan terakhir tahun 2013 Kurkulum 2013 (KURTILAS).

Begitu pentingnya sehingga kurikulum selalu mengalami perubahan dengan tujuan dapat memaksimalkan hasil pendidikan dengan cara menjalankannya sesuai aturan dan kabijakan yang telah ditetapkan.

Kedua, Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP, 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yang dimilikinya.

Ketiga, Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

Keempat, Meningkatkan tatakelola layanan pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan

sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

B. TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya ingin meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat. Melalui misinya yaitu ”Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi” upaya yang dilakukan :

1. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didik**

   Meningkatkan kuantitas peserta didik adalah upaya secara terus menerus yang dilakukan melalui intensifikasi komunikasi formal maupun informal baik di tataran internal maupun eksternal kedinasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Disamping itu upaya pemerataan dan perluasan akses dengan cara pengembangan model pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk keberhasilan hal tersebut perlu dibangun tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan dan partisipasi dari semua komponen yang ada. Meningkatkan kualitas peserta didik adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus melalui inovasi pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang tinggi ditandai oleh tingkat pencapaian angka kelulusan, rendahnya angka mengulang dan lain - lain.

2. **Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan**

   Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integriras dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

3. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan**

   Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melaui pembangunan gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tatakelola pendidikan

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

Pengertian Cerdas dan Kompetitif

Cerdas dan Komprehensif	
Multiple Intelegence	• Kecerdasan Verbal Beraktualisasi diri melalui kecerdasan menggunakan kata-kata dan bahasa untuk mengekspresikan makna, ide atau gagasan-gagasan. • Kecerdasan Matematis Beraktualisasi diri melaui kecerdasan penggunaan logika untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasi-operasi matematika. • Kecerdasan Visual Spasial Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan olah bentuk dan ruang tiga dimensi. • Kecerdasan Kinestetis – Fisik Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan olah fisik. • Kecerdasan Musikal Beraktualisasi melalui penggunaan kecerdasan sensitivitas terhadap pola titi nada, melodi, ritme dan nada. • Kecerdasan Inter – Personal Beraktualisasi diri melalui pemahaman dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain (Learning to life together). • Kecerdasan Intra – Personal

Cerdas dan Komprehensif	
Kompetitif	Beraktualisasi diri untuk memahami diri sendiri dan pengendalian diri untuk menumbuhkan/memperkuat keimanan dan ketaqwaan. • Kecerdasan Natural Beraktualisasi diri melalui kemampuan mengobservasi pola – pola alam dan memahami sistem alamiah atau sistem buatan manusia. • Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, bersahabat dengan perubahan, inovatif, menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajar sepanjang hayat.

Visi Pemerintah Kabupaten Cirebin dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut, namun demikian, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer teknologi yang biasanya menyertai investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan investasi.

Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan harus menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Motifasi merupakan alat pemicu untuk medapat suatu yang diharapkan. Tinggi rendahnya motifasi akan langsung berdampak pada tingkat keberhasilan dan prestasi peserta didik dalam berbagai hal. Motifasi perlu dipupuk setiap saat oleh pendidik, orang tua, masyarakat dan oleh peserta didik itu sendiri, karena motifasi tidak serta merta hadir tanpa ada penyebab, harapan dan cita-cita yang akan dicapai.

Motifasi belajar tidak hanya ditumbuh kembangkan pada peserta didik semata melainkan pada semua lini yang bersinggungan dengan pengelolaan pendidikan karena diantara keduanya dapat saling mempengaruhi dan saling memberi energi positif dalam rangka mengembangkan potensi diri secara maksimal.

Banyak kesempatan dan ruang waktu utuk membangkitkan semangat belajar bagi peserta didik baik pada saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar maupun dalam kesempatan lain dalam situasi formal maupun nonformal. Kebersamaan yang intensif antara peserta didik denga pendidik melahirkan situasi yang strategis untuk memompa motifasi belajar siswa sehingga dapat mengasah kecerdasan sebagai modal dasar bagi keberhasilan yang lebih besar pada masa yang akan datang.

Bermacam-macam cara dapat digunakan untuk meningkatkan motifasi belajar peserta didik, dapat secara langsung maupun tidak langsung, pada saat sendiri ataupun berkelompok. Sering motifasi belajar timbul setelah peserta didik melihat, mendengar ataupun merasakan sendiri sesuatu hal yang dapat merubah sikap mental dalam memberikan apresiasi terhadap pentingnya kecerdasan bagi seseorang dalam meningkatkan taraf hidup sehingga dapat bersaing pada era global.

1. SASARAN

1.1 **Meningkatnya Kemempuan Membaca**

Buku sangat berkaitan erat dengan kemampuan membaca. Buku adalah jendela dunia, karena itu, siapa yang suka dan gemar membaca buku, maka pasti pengetahuannya sangat luas, itulah generasi yang diimpikan oleh bangsa ini. hal tersebut akan bisa dilakukan tentunya dengan cara menyediakan buku-buku kontemporer, sebab pantangan saat ini adalah budaya membaca dalam dunia generasi kita masih jarang, terlebih di kabupaten Cirebon belum terdapat toko buku yang lengkap. Generasi akan kaya ilmu ketika didukung oleh persediaan buku yang lengkap. Kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini jangan dijadikan alasan bahwa pengadaan buku tidak diperlukan lagi, sebab ada paradigma yang berbeda.

1.2 **Meningkatnya Kesempatan dan Pemerataan Perluasan Akses Pendidikan**

Sasaran perluasan dan pemerataan Akses Pendidikan merupakan upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan dengan mengacu kepada skala prioritas dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk Kabupaten Cirebon dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda. Selain itu beasisawa transisi, dana Bos sangat menunjang dan meningkatkan perluasan akses ini.

1.3 **Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan**

Sudah merupakan pendapat umum bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas, mutu dan relevansi pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya insane. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Begitupun di Kabupaten Cirebon upaya pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan yang berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memilki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dari aspek kualitas , pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yangdi milikinya.

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

1.4 **Meningkatnya Efektifitan dan Efisiensi Manajemen Pendidikan**

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

2. STRATEGI

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2019—2024 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2018. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development.*

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2019--2024 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan

khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keterjangkauan atau pendanaan, pembelajaran dan penilaian, dan tata kelola manajemen pendidikan.

2.1 STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu.

2.1.1. Peningkatan akses layanan pendidikan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk merealisasikannya maka Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon membangun strategi pelayanan untuk pendidikan jalur formal/non formal sebagai berikut.

a) Penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan guru TK, SD, SMP, serta tutor Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten;

b) Penyediaan manajemen TK, SD, SMP, SMA, SMK serta Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;

c) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu, serta keterlaksanaan akreditasi;

d) Penyediaan dana BOS serta subsidi lainnya untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

2.1.2. Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru kelas mengampu mata pelajaran untuk satu rombongan belajar, sedangkan guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Guru tersebut wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

Apabila diamati secara seksama, guru negeri (PNS) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada jenjang TK, SD, SMP terdapat kekurangan. Selain itu tidak meratanya sebaran guru menambah parah gap antara sekolah yang satu dengan lainnya.

Penataan guru mutlak perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan jumlah rombel atau jumlah jam pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan.

Strategi yang dibangun dalam mengatasi kesenjangan jumlah guru adalah dengan menggunakan data Dapodik sebagai basis satu-satunya data dalam seluruh program dan kegiatan. Dari data tersebut dibangun aplikasi yang dapat memcerminkan berapa jumlah rombel dan berapa guru yang ada sehingga diketahui berapa kekurangan guru di sekolah tersebut. Begitu juga untuk jenjang SMP berpa guru mata pelajaran tertentu dibutuhkan disekolah tertentu sehingga Dinas Pendidikan dapat mengambil kebijakan untuk langkah selanjutnya.

Langkah pintas yang dapat dilakukan adalah dengan menunjuk guru honorer untuk memenuhi kekurangan tersebut agar pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya.

Guru berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya tergantung pada bagaimana guru memahami komponen-komponen yang terkait langsung dengan proses pembelajaran itu sendidri diantaranya:

a) Tujuan Pembelajaran

Langkah pertama proses belajar mengajar ialah penentu tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu konsep pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran umum telah ditulis dalam Garis-Baris Besar Program Pengajaran (GBPP). Komponen tujuan pembelajaran adalah suatu tahap kegiatan belajar mengajar yang turut memecahkan problem pengajaran.

b) Murid

Murid adalah orang yang melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Murid dalam suatu kelompok harus memiliki karakteristik yang relatif sama. Untuk penentuan karakteristik lazim digunakan empat teknik penentukan karakteristik siswa, mengkaji dokumen, tes, wawancara, dan observasi.

c) Guru

Guru adalah orang yang menggerakkan suatu proses belajar. Tanpa profesionalisme suatu proses belajar mengajar tidak mungkin mencapai hasil yang baik. Keberadaan guru yang profesional mutlak menjadi dasar pengembangan sistem pembelajaran.

d) Konsep Pembelajaran

Konsep pembelajaran mengandung berbagai materi pembelajaran yang harus dikaji warga belajar. Dengan menguasai sejumlah konsep pembelajaran berarti siswa memiliki modal untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Konsep pembelajaran harus dikembangkan jadi bahan pembelajaran yang memungkinkan warga belajar memperoleh macam-macam materi pembelajaran yakni fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Dengan adanya pengembangan bahan pembelajaran yang teruji memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.

e) Pendekatan/Metode/Teknik

Pendekatan berupa suatu pendapat tentang pengajaran bahasa yang didasari falsafah tentang bahasa dan pengajaran bahasa, seperti pendekatan komunikatif dan pendekatan alamiah. Teknik pembelajaran digunakan untuk mengurutkan setiap langkah kegiatan. Teknik yang dapat digunakan seperti pemberian, penjelasan, diskusi. Pendekatan dan metode maupun teknik merupakan subsistem yang digunakan dalam pembelajaran.

f) Media/Alat peraga

Penyampaian materi pembelajaran memerlukan media suatu alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran disebut media belajar (alat peraga). Alat ini digunakan hanya untuk membantu memperjelas siswa kepada hal-hal yang memang belum jelas. Media membentuk warga belajar terhindar dari verbalisme, karena sesuatu yang dikatakan ditunjukan dengan bendanya atau tiruannya.

g) Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) warga belajar setelah mengkaji konsep pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dapat berupa evaluasi lisan, evaluasi tulisan, dan evaluasi perbuatan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan pertanyaan tulisan yang di jawab dengan lisan, atau pertanyaan lisan dijawab dengan lisan. Evaluasi tulisan diharapkan warga belajar menjawab dengan tulisan. Evaluasi perbuatan menekankan warga belajar untuk melakukan suatu kegiatan berupa motorik (gerak), seperti mengekpresikan suatu adegan bagian drama, menunjukkan perilaku senang/susah/sedih, dan sebagainya.

2.1.3 Peningkatan infrastruktur Pendidikan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki infrastruktur/sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Satu Desa/Kelurahan dilayani minimal satu satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), serta dalam satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SD dengan 6 Rombngan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.340 m2, sedangkan luas bangunan minimal 400 m2.

Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP yang dapat menampung semua lulusan SD di kecamatan tersebut serta satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SMP dengan 3 Rombngan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.440 m2, semakin banyak jumlah rombel semakin bertambah luas lahan yang mesti disediakan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan luas bangunan minimal 430 m2 untuk bangunan lantai satu, dan semakin besar jumlah rombel semakin luas pula bangunan yang mesti disediakan.

2.1.4 Peningkatan layanan tatakelola pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah penting dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data siswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu direalisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

Layanan data dan informasi adalah bagian yang tak kalah pentingnya bagi terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien diantaranya melalui proses kolekting data, pengolahan data, produksi data dan pendayagunaan data. Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi, proses tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara manual, tetapi mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi melalui pembangunan sistem layanan data dan informasi serta meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pendidikan sehingga sistem layanan tersebut teraji dengan sempurna sesuai harapan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	**Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat**		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	22,44 Prosen	22,58	22,71	22,85	22,99
1.1.1.		Meningkatnya kemampuan membaca	Angka Melek Huruf	96,00 Prosen	96,58	97,16	97,74	98,32
			Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa SD	76,00 Prosen	76,46	76,91	77,38	77,84
			Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa SMP	59,50 Prosen	63,30	67,10	70,90	74,70
1.1.2.		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,78 Prosen	6,88	6,98	7,08	7,18
1.1.3.		Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,52 Prosen	12,67	12,82	12,97	13,12
1.1.4.		Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Manajeman Bebasisa Sekolah	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00
			Indek Kepuasan Masyarakat	78,30 Point	78,35	78,42	78,45	78,50
			Harapan Lama Sekolah	0,00 Prosen	0,00	0,00	0,00	0,00

E. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON ESELON II (PIMPINAN SKPD)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	$APS = \frac{Jml.\ Penduduk\ Usia\ Sekolah\ yang\ masih\ bersekolah}{Jml.\ Penduduk\ Usia\ Sekolah} X\ 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	BPS dan Diskominfo	22.44 Prosen	22.44 Prosen
1.1.1.	Meningkatnya kemampuan membaca	Angka Melek Huruf	$\frac{Jml.\ Penduduk\ (usia\ diatas\ 15\ tahun)\ yang\ bisa\ menulis}{Jml.\ Penduduk\ usia\ 15\ tahun\ ke\ atas} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	BPS / Infokom	96 Prosen	96 Prosen
1.1.2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$(thn)\ RLS = \frac{Jml.\ Penduduk\ usia\ >15\ Th\ X\ Lama\ Pendidikan\ yang\ dihabiskan^{*})}{Jml.\ Penduduk\ >15\ Th\ Yang\ sedang\ bersekolah\ atau\ telah\ berijazah\ ^{**})} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	6.78 Tahun	6.78 Tahun
1.1.4.	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Manajeman Bebasisa Sekolah	$MBS = \frac{Jml.\ Sekolah\ Yang\ Menerapan\ MBS}{Jml.\ Sekolah\ yang\ ada} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Disdik	100 Prosen	100 Prosen
1.1.1.	Meningkatnya kemampuan membaca	Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa	$\frac{Jml.\ Siswa\ SD\ yang\ bisa\ baca\ menulis\ huruf\ Al\ Qur'an}{Jml.\ Seluruh\ Siswa\ SD} x100$	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	76 Prosen	76 Prosen
1.1.4.	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Indek Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{Jml.\ Total\ dari\ persepsi\ nilai\ perunsur}{Total\ Nilai\ yang\ terisi} X\ Nilai\ Penimbang$	Non Kumulatif	Meningkat	Dinas Pendidikan	78.3 Point	78.3 Point
1.1.3.	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK\ x \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Non Kumulatif	Meningkat	BPS, Disdik dan Disdukcapil	12.52 Tahun	12.52 Tahun

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.18.	Program Pendidikan Non Formal	3.364.846.700,00	3.188.196.100,00	Sumber Dana: DAU, PAD
1.1.1.23.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.1.2.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.283.511.300,00	2.462.394.900,00	Sumber Dana: DAU, PAD
1.1.2.16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	47.571.148.200,00	297.117.921.443,00	Sumber Dana: DAU, DID, PAD
1.1.3.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.442.079.100,00	353.275.000,00	Sumber Dana: DAU
1.1.4.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.952.266.900,00	1.826.947.700,00	Sumber Dana: DAU
1.1.4.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.513.025.300,00	3.372.747.300,00	Sumber Dana: DAU
1.1.4.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	Sumber Dana:
1.1.4.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	448.897.200,00	432.163.600,00	Sumber Dana: DAU
1.1.4.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.612.000,00	44.612.000,00	Sumber Dana: DAU
1.1.4.07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	27.233.800,00	17.637.500,00	Sumber Dana: DAU
1.1.4.22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.285.269.100,00	927.556.400,00	Sumber Dana: DAU
	J U M L A H	**63.932.889.600,00**	**309.743.451.943,00**	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab atas kebutuhan informasi perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pendidikan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Pendidikan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dimana pencapaian Sasaran tersebut diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Adapun hasil pengukuran kinerja (PK) dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari

nilai tersebut yaitu :

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

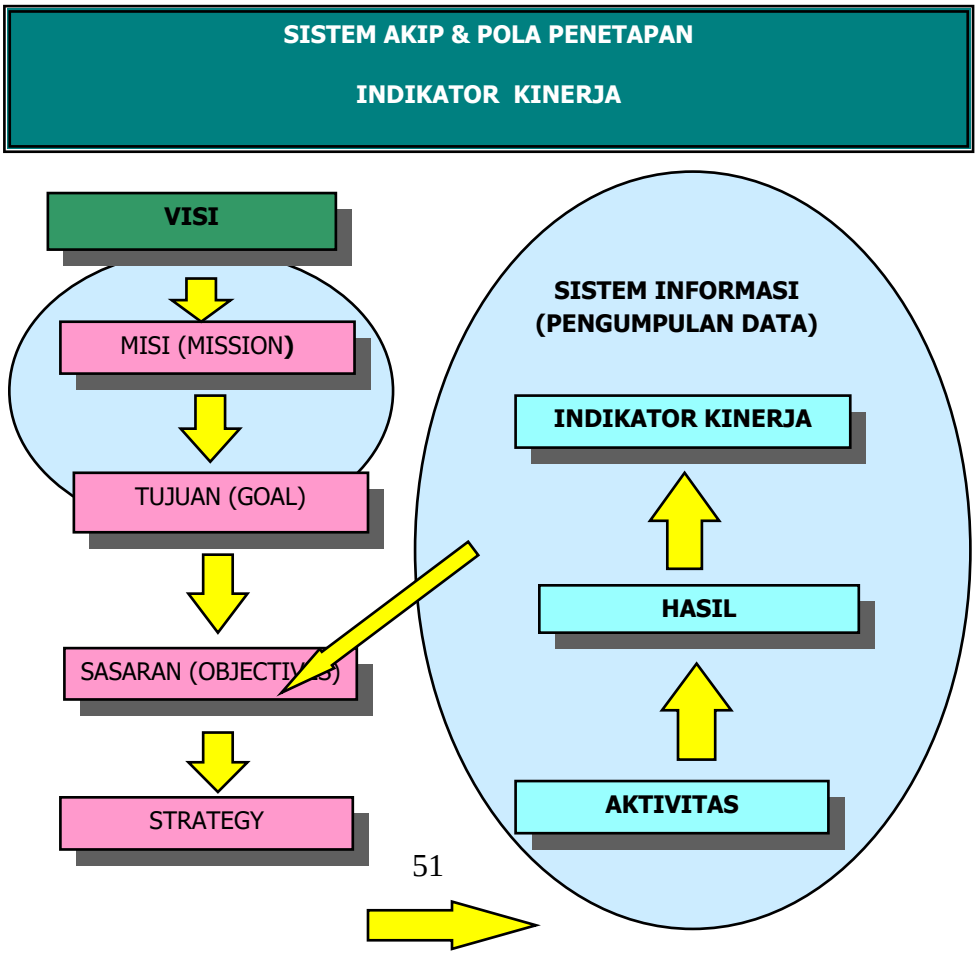

B. Pengukuran dan Analisis Kinerja

1. Ringkasan Kinerja

Kinerja yang telah dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berupa pencapaian sasaran, sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan pada tahun 2019-2024 sebanyak 4 (Empat) buah sasaran dengan 17 (Tujuh Belas) indikator, yang terinci sebagai berikut :

- 13 target tercapai
- 4 target tidak tercapai

Pada tahun anggaran 2020 sebanyak 4 sasaran telah dilaksanakan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan tahun 2020 baik. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi / tidak dapat menyesuaikan dengan alokasi waktu yang disediakan oleh Provinsi. Disamping itu masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti masih rendahnya mutu pendidikan, kualitas maupun kwantitas tenaga pendidik, sarana prasarana serta biaya pendidikan belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran (Pengukuran Pencapaian Kegiatan /PPK)

2. Rincian Kinerja

a. MENINGKATNYA KEMAMPUAN MEMBACA

Meningkatnya Kemampuan Membaca ditandai dengan tingkat capaian Angka Melek Huruf dan Melek Huruf Al-Qur'an.

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

1. ANGKA MELEK HURUF

No.	Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Jumlah Penduduk ≥ 15 Tahun Dapat Membaca	96	99,73	103,89
	Jml. Rata-rata	96	99,73	103,89

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2020/2021

Target Angka Melek Huruf pada tahun 2020 sebesar 96% dengan realisasi mencapai 99,73%. dari Jumlah Penduduk ≥ 15 Tahun Dapat Membaca. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik atau tercapai hal ini ditunjang dengan Program Pendidikan Non Formal dengan menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional yang dikelola oleh masyarakat melalui lembaga PKBM dengan warga belajar penduduk yang buta aksara.

2. MELEK HURUF AL-QUR'AN

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD	76	72,86	95,87
2	SMP	59,55	86,46	145,19
	Jml. Rata-rata	67,78	79,66	120,53

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2020/2021

Target Melek Huruf Al-Qur'an SD pada tahun 2020 sebesar 76 % dengan realisasi mencapai 72,86 %. dari jumlah siswa SD sebanyak 194.798 siswa. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik atau Tercapai dikarenakan adanya Program Pemerintah Kabupaten Cirebon Gerakan Maghrib Mengaji (GEMMAR) Mengaji dan disetiap sekolah diterapakan program mengaji setiap pagi selama 20 menit sebelum kegiatan belajar dilaksanakan.

Target Melek Huruf Al-Qur'an SMP sebesar 59,55 % dengan realisasi mencapai 86,46 % dari jumlah seluruh siswa SMP sebanyak 81.357 siswa. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik Atau Tercapai dikarenakan adanya Program Pemerintah Kabupaten

Cirebon Gerakan Maghrib Mengaji (GEMMAR) Mengaji. dan disetiap sekolah diterapakan program mengaji setiap pagi selama 20 menit sebelum kegiatan belajar dilaksanakan.

b. MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN

Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan ditandai dengan tingkat capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah, APK, APM, Rasio Ketersediaan Siswa Per Kelas dan Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal.

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

1. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

No.	Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	Jumlah Tahun Ijazah Penduduk ≥ 25 Tahun	6,78	6,74	99,41
	Jml. Rata-rata	6,78	6,74	99,41

Sumber Data: Buku Indek Pembangunan Manusia 2019 (Diskominfo)

Rata-Rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan variabel RLS menggunakan angka usia penduduk yang berumur 25 tahun keatas yang memiliki ijazah terakhir atau tingkat pendidikan terakhir. Target Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 6,78 tahun dengan realisasi capaian rata-rata Kabupaten sebesar 6,74 tahun, capain ini meningkat . Hal ini menggambarkan bahwa ada peningkatan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan capaian 6,62 tahun, hal ini karena adanya dukungan penyelenggaran pendidikan non formal Kelompok Belajar Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA dan merupakan program prioritas dalam mendongkrak peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	PAUD	66,80	42,03	62,92
2	SD sederajat	115,00	116.22	101,06
3	SMP sederajat	113,00	157,08	139,01
	Jml. Rata-rata	98,27	105,11	101,00

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2020/2021

Target APK PAUD pada tahun ini sebesar 66,80% atau jumlah siswa PAUD sebanyak 45.953 siswa sedangkan realisasinya mencapai 42,03% . Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik walaupun masih terdapat anak usia dini yang belum mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini. Kondisi demikian terjadi karena masih ada masyarakat yang belum mau menyekolahkan anaknya ke jenjang PAUD/TK dengan alasan nanti saja sekalian masuk Sekolah Dasar (SD) karena merasa kerepotan.

Target APK SD pada tahun ini sebesar 115,00% atau jumlah siswa SD sebanyak 227.073 siswa sedangkan realisasinya mencapai 116.22% . Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik Atau Tercapai walaupun belum berada pada posisi angka ideal, karena masih terdapat anak usia kurang dari 7 tahun sudah menjadi siswa SD dan lebih dari 12 tahun masih berada pada jenjang sekolah dasar. Kondisi demikian terjadi pada beberapa tahun terahir dikarenakan prioritas program pemerintah untuk mensukseskan wajib belajar sembilan tahun.

Target APK SMP sebesar 113,00% atau jumlah seluruh siswa SMP sebanyak 146.227 siswa sedangkan realisasinya mencapai 157,08%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja baik walaupun belum berada pada posisi angka ideal, karena masih terdapat anak usia kurang dari 13 tahun sudah menjadi siswa SMP dan lebih dari 13 tahun masih berada pada jenjang SMP. Kondisi demikian dikarenakan prioritas program pemerintah untuk mensukseskan wajib belajar sembilan tahun. dikarenakan adanya interfensi program bantuan dana seperti BOS , bea siswa dan lain-lain.

2. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD sederajat	100,00	103,75	103,75
2	SMP sederajat	98,30	139,56	141,97
	Jml.rata-rata	99,15	121,66	122,86

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2020/2021

Target APM SD sebesar 100,00% atau jumlah siswa usia 7-12 sebanyak 227.073 siswa sedangkan realisasinya mencapai 103,75%. Hal ini menggambarkan capaian kinerja cukup baik Atau Tercapai walaupun masih terdapat anak usia 7 - 12 tahun masih belum atau tidak sekolah lagi disebabkan faktor ekonomi keluarga dan lain-lain.

Target APM SMP 98,30 % atau jumlah siswa usia 13-15 tahun sebanyak 146.227 siswa sedangkan realisasinya baru mencapai 139,56%. Hal ini menggambarkan capaian kinerja cukup baik atau Tercapai walaupun masih terdapat anak usia 13-15 tahun masih belum atau tidak sekolah lagi disebabkan faktor ekonomi keluarga dan lain-lain.

3. RASIO KETERSEDIAAN SISWA PER KELAS (S/K)

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	TK	20,00	22,00	110,00
2	SD	24,00	27,00	88,89
3	SMP	32,00	22,00	145,45
	Jml. rata-rata :	25,33	23,67	114,78

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2020/2021

Target Rasio Ketersediaan Siswa Per Kelas (S/K) pada jenjang TK sebesar 20,00 : 1 sedangkan realisasinya sebesar 22,00 : 1, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai. Semua kecamatan telah mencapai target.

Target Rasio Ketersediaan Siswa Per Kelas (S/K) pada jenjang SD sebesar 24,00 : 1 sedangkan realisasinya sebesar 27,00 : 1, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai. Semua kecamatan telah mencapai target.

Target Ketersediaan Siswa Per Kelas (S/K) pada jenjang SMP sebesar 32,00 : 1 sedangkan realisasinya sebesar 22,00 : 1, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan kriteria baik. Ada beberapa kecamatan yang belum mencapai target, Kondisi demikian terjadi di beberapa sekolah terutama SMP swasta dan SMP yang berada di daerah terpencil dan terpencar serta daerah yang kepadatan penduduknya masih rendah.

4. KETERSEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	PKBM	80	64	80,00
2	LKP	70	70	100,00
	Jml. Rata-rata :	75	67	90,00

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2020/2021

Target Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal pada PKBM sebesar 80 sedangkan realisasinya sebesar 64, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai.

Target Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal pada LKP sebesar 70 sedangkan realisasinya sebesar 70, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai.

c. MENINGKATNYA MUTU DAN RELEFANSI PENDIDIKAN

Peningkatan mutu, relefansi pendidikan ditandai dengan Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Putus Sekolah (APS), Angka Lulusan (AL), Angka Melanjutkan, Guru Layak Mengajar, Rasio Guru Per Siswa, Ketersediaan Ruang Kelas Baik, Terakreditasi.

Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui pencapaian 8 (Delapan) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

1. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan variable yang berpengaruh terhadap dimensi pendidikan, yang didefinisikan sebagai lamanya bersekolah (dalam tahun). Harapan Lama Sekolah (HLS). Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 memiliki nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,57. Nilai tersebut meningkat jika dbandingkan tahun 2018 yaitu 12,22. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,57 menunjukan bahwa masyarakat di Kabupaten Cirebon memiliki harapan bersekolah sampai 12 tahun atau setara dengan tamat SMA, hal ini sesuai dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah.

2. ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD sederajat	0,01	0,00	0,00
2	SMP sederajat	0,19	0.14	73,68
	Jml. Rata-rata :	0,10	0.07	36,84

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2020/2021

Target APS pada jenjang SD sebesar 0,01% sedangkan realisasinya sebesar tersebar 0,00% pada 920 SD Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Kecamatan Waled, Babakan, Sedong, Astanajapura, Mundu, Kapetakkan, Arjawinangun, Susukan, Gegesik, Kaliwedi, Gebang, Karangwareng, Gunung Jati, Pabuaran, Plered, Suranenggala dengan jumlah APS sebanyak 0.1%, merupakan angka tertinggi bila dibandingkan dengan kecamatan lain dimana kecamatan lain telah mencapai 0%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik Atau tercapai, karena bisa menekan angka putus sekolah dari tahun 2019 sampai tahun 2020.

Target APS pada jenjang SMP sebesar 0,19% sedangkan realisasinya sebasar 0,14% tersebar pada 200 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Kecamatan Mundu jumlah APS sebanyak 1.78% merupakan angka tertinggi bila dibandingkan dengan kecamatan lain. Sedangkan dibeberapa kecamatan telah mencapai 0%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik Atau tercapai karena bisa menekan angka putus sekolah dari tahun 2019 sampai tahun 2020.

3. ANGKA LULUSAN (AL)

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD	100,00	98,96	98,96
2	SMP	99,97	95,53	95,56
3	Paket A Setara SD	95,00	95,00	100,00
4	Paket B Setara SMP	95,00	95,00	100,00
5	Paket C Setara SMA	80,00	92,90	116,13
6	Lembaga Kursus dan pelatihan	100,00	100,00	100,00
	Jml rata-rata :	95,00	96,23	101,78

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2020/2021

Target AL pada jenjang SD sebanyak 100,00% sedangkan realisasinya sebesar 98,96% tersebar pada 920 SD Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan belum mencapai 100% Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja belum cukup baik.

Target AL pada jenjang SMP sebanyak 99,97% sedangkan realisasinya sebesar 95,53% tersebar pada 200 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan belum mencapai 100% Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja belum cukup baik.

Target AL pada jenjang Paket A Setara SD sebanyak 95,00% sedangkan realisasinya sebesar 95,00% tersebar pada 64 lembaga PKBM Pengelola Paket A setara SD yang dikelola masyarakat di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan belum mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja belum cukup baik.

Target AL pada jenjang Paket B Setara SMP sebanyak 95,00% sedangkan realisasinya sebesar 95,00% tersebar pada 64 lembaga PKBM Pengelola Paket B setara SMP yang dikelola masyarakat di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan belum mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja belum cukup baik

Target AL pada jenjang Paket C Setara SMA sebanyak 80,00% sedangkan realisasinya sebesar 92,90% tersebar pada tersebar pada 64 lembaga PKBM Pengelola Paket C setara SMA yang dikelola masyarakat di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan belum mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja belum cukup baik

Target AL pada jenjang Lembaga Kursus dan Pelatihan sebanyak 80,00% sedangkan realisasinya sebesar 92,90% tersebar pada tersebar pada 70 lembaga LKP Pengelola Kursus dan Pelatihan yang dikelola masyarakat di kabupaten cirebon. Di beberapa Kecamatan telah mencapai 100%. Namun di sebagian besar kecamatan belum mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja belum cukup baik

4. ANGKA MELANJUTKAN

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD ke SMP	100,00	82,99	82,99
	Jml. Rata-rata :	100,00	82,99	82,99

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2020/2021

Target Angka Melanjutkan pada jenjang SD ke SMP sebesar 100,00% sedangkan realisasinya sebesar 82,99% tersebar pada 920 SD Negeri / swasta dan 200 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik Atau Tercapai.

5. GURU LAYAK MENGAJAR

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	PAUD	71,92	77,18	107,31
2	SD	97,00	97,06	100,06
3	SMP	98,20	97,63	99,42
	Jml. Rata-rata :	89,04	90,62	102,26

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2020/2021

Target Guru layak mengajar pada jenjang TK sebanyak 71,92% sedangkan realisasinya sebesar 77,18% tersebar pada 190 TK Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik atau Tercapai.

Target Guru layak mengajar pada jenjang SD sebanyak 97,00% sedangkan realisasinya sebesar 97,06% tersebar pada 920 SD Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja cukup baik atau Tercapai.

Target Guru layak mengajar pada jenjang SMP sebesar 98,20% sedangkan realisasinya sebesar 97,63% tersebar pada 200 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja menunjukkan kriteria baik atau tercapai.

5. RASIO GURU PER SISWA

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	TK	15,00	10,00	66,67
2	SD	23,00	21,00	91,30
3	SMP	17,00	15,00	113,33
	Jml. rata-rata :	18,33	15,33	90,43

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan 2020/2021

Target Rasio guru per siswa pada jenjang TK sebesar 1:15 sedangkan realisasinya sebesar 1:10 tersebar pada 190 TK Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai.

Target Rasio guru per siswa pada jenjang SD sebesar 1:23 sedangkan realisasinya sebesar 1:21 tersebar pada 920 SD Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai.

Target Rasio guru per siswa pada jenjang SMP sebesar 1:17 sedangkan realisasinya sebesar 1:15 tersebar pada 200 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah baik dikarenakan ada kebijakan untuk menunjuk tenaga honorer untuk memenuhi kekurangan guru baik di jenjang SD maupun SMP.

6. KETERSEDIAAN RUANG KELAS BAIK

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	TK	60,36	90,22	149,47
2	SD	70,42	59,27	84,17
3	SMP	80,50	75,54	93,84
	Jml. Rata-rata :	70,43	75,01	109,16

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan2020/2021

Target ketersediaan ruang kelas baik pada jenjang TK sebesar 60,36% sedangkan realisasinya sebesar 90,22% tersebar pada tersebar pada 190 TK Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai.

Target ruang kelas baik pada jenjang SD sebesar 70,42% sedangkan realisasinya sebesar 59,27% tersebar pada 920 SD Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Kecamatan Kaliwedi 45,74% merupakan angka Terendah bila dibandingkan dengan kecamatan lain. Sedangkan Kecamatan Klangenan 75,33% merupakan angka Tertinggi. Dalam hal peningkatan mutu sarana Ruang Kelas Sekolah baik masih belum mencapai harapan yang ditargetkan, hal ini disebabkan masih kurang seimbangnya antara alokasi anggaran untuk rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah dengan jumlah Ruang Kelas yang rusak yang setiap waktu bertambah dikarenakan faktor alam, lingkungan dan usia bangunan sendiri.

Target prosentase ruang kelas baik pada jenjang SMP sebesar 80,50% sedangkan realisasinya sebesar 75,54% tersebar pada 200 SMP Negeri / swasta di kabupaten cirebon. Kecamatan Gempol merupakan kecamatan dengan capaian 100,00 % merupakan angka tertinggi bila dibandingkan dengan kecamatan lain. Sedangkan kecamatan Pasaleman 0,0 % merupakan angka terendah. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah menunjukkan baik atau tercapai, bahkan ada kenaikan capaian pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

7. TERAKREDITASI

No	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	TK	72,59	64,00	88,17
2	SD	98,00	97,60	99,59
3	SMP	87,58	82,50	94,20
	Jml.Rata-rata :	86,06	81,37	93,99

Sumber Data: Buku Profil Pendidikan2020/2021

Target Terakreditasi jenjang pendidikan TK sebesar 72,59 sedangkan realisasinya 64,00. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja menunjukkan kriteria belum tercapai karena masi terdapat beberapa sekolah baru yang belum melakukan akreditasi terutama TK swasta.

Target Terakreditasi jenjang pendidikan SD sebesar 98,00 sedangkan realisasinya 97,60. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja menunjukkan kriteria belum tercapai karena masi terdapat beberapa sekolah baru yang belum melakukan akreditasi terutama SD swasta.

Target Terakreditasi jenjang pendidikan SMP sebesar 87,58 sedangkan realisasinya 82,50. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja menunjukkan kriteria belum tercapai karena masih terdapat beberapa sekolah baru yang belum melakukan akreditasi terutama SMP swasta.

d. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan.

Tata Kelola Akuntabilitas dapat ditandai dengan adanya efisiensi internal sekolah dimana dapat digambarkan melalui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalisme para pelaksana dalam mendorong terlaksananya manajerial yang tangguh dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil sesuai target. Manajemen berbasis sekolah merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lagi mengingat saat ini di mana pendidikan sedang menjadi primadona dan menjadi sorotan hampir seluruh lapisan masyarakat sehingga perlu dibangun transparansi di semua lini. Secara terperinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	SD	79,55	80,97	101,79
2	SMP	77,77	79,95	102,80
	Jml. rata-rata :	78,66	80,46	102,30

Target pencapaian IKM satuan pendidikan jenjang SD 79,55 Point sedangkan realisasinya mencapai 80,97 Point. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sudah baik atau tercapai.

Target pencapaian IKM satuan pendidikan jenjang SMP 77,77 Point sedangkan realisasinya mencapai 79,95 Point. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja baik atau tercapai.

2. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

No.	Sat.Pdd.	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	PAUD	100	100	100
2	SD	100	100	100
3	SMP	100	100	100
	Jml. rata-rata :	100	100	100

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada institusi sekolah untuk mengatur sekolah sesuai dengan potensi, kebutuhan dan tuntutan sekolah yang bersangkutan. Sekolah diberi otonomi yang luas dan bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai program sekolah dengan berbagai implikasinya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Di Kabupaten Cirebon seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta telah melaksanakan MBS dengan baik meskipun masih terus menerus perlu peningkatan kualitasnya. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dan menyeluruh.

C. PEMBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 3 (tiga) tahun yang direncanakan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada uraian dibawah ini

N0.	Sasaran / Indikator	TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		REALISASI
		TARGET 2017 (Th. N-2)	TARGET 2018 (Th. n-1)	TARGET 2019 (Th. n)	TARGET 2020 (Tahun n+1)		REALISASI 2017 (Th. n-2)	REALISASI 2018 (Th. n-1)	REALISASI 2019 (Th. n)	TAHUN 2020 (Tahun. n+1)		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)		(8)	(10)	(11)	(12)	(12)		
1	Meningkatnya Kesempatan dan pemerataan pendidikan.				1.1.1.1.1. Meningkatnya kemampuan membaca	**1.1.1.1.1.1. Angka melek huruf** **96%**	% 94.77	% 95.53	% 99.73	**1.1.1.1.1.1. Angka melek huruf**	**96%**	**99.73 %**
						1.1.1.1.1.2. Angka melek huruf Al Qur'an				**1.1.1.1.1.2. Angka melek huruf Al Qur'an**		
	- RLS (Th)	Th 6.50	Th 6.75	Th 7.00		SD (%) **76**	Th 6.41	Th 6.61	Th 72.86	SD (%)	**76**	**72.86**
	- AMH	% 94.83	% 95.03	% 95.23		SMP (%) **59.55**	% 94.77	% 95.53	% 57.76	SMP (%)	**59.55**	**58.31**
	MELEK HURUF AL-QUR'AN				1.1.1.1.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	**1.1.1.1.2.0. Angka Rata-rata Lama Sekolah** **6.78**		6.62	6.74	**1.1.1.1.2.0. Angka Rata-rata Lama Sekolah**	**6.78**	**6.74**
	SD (%)	% 54	% 62	% 70			% 43.70	% 75.20	% 76.00			
	SMP (%)	% 61	% 68	% 75		**1.1.1.1.2.1. Angka Partisipasi Kasar**	% 85.97	% 55.71	% 75.00	**1.1.1.1.2.1. Angka Partisipasi Kasar**		
	SMA (%)	% 66					% 94.31					
	SMK (%)	% 66				APK PAUD % **66.80**	% 86.60			APK PAUD %	**66.80**	**42.03**
						APK SD/MI % **115**				APK SD/MI %	**115**	**116.22**
	- APK PAUD	% 37.82	% 38.91	% 40.00		APK SMP/MTs % **113**	% 49.39	% 66.40	% 65.80	APK SMP/MTs	**113**	**157.08**
	- APM PAUD	% 37.80	% 38.90	% 40.00			%	%	%			
	- APK SD/MI	% **109.29**	% **109**	% **109**		**1.1.1.1.2.2. Angka Partisifasi Murni**	% **120.90**	% **117.05**	% **116.52**	**1.1.1.1.2.2. Angka Partisifas Murni**		

(1)	(4)	(6)	(7)	(8)		(8)		(10)	(11)	(12)	(12)		
	- APM SD/MI	% **99.94**	% **99.95**	% **99.96**		APM SD/MI %	100	% **106.52**	% **107.33**	% **103.32**	APM SD/MI %	100	103.75
	- APK SMP/MTs	% **110**	% **110**	% **110.11**		APM SMP/MTs %	**98.30**	% **114.41**	% **115.08**	% **122.27**	APM SMP/MTs	**98.30**	**139.56**
	- APM SMP/MTs	% **90.10**	% **90.30**	% **90.50**				% **95.54**	% **97.46**	% **97.88**			
	- APK SM / K	% **80.50**				**1.1.1.1.2.3. Rasio Ketersediaan Siswa per Kelas :**		% **100.65**			**1.1.1.1.2.3. Rasio Ketersediaan Siswa per Kelas :**		
	- APM SM / K	% **61.80**				TK (%)	1:19,50	% **75.92**			TK (%)	1:19,50	**22**
						SD	**24**				SD	**24**	**27**
2	Meningkatnya Mutu dan rele-					SMP	**32**				SMP	**32**	**22**
	vansi pendidikan.												
	- Angka Lulusan SD sederajat	% **99.95**	% 99.96	% 99.97		**1.1.1.1.2.3. Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal**		% 95.80	% 100	% 97.50	**1.1.1.1.2.3. Ketersediaan Lembaga Pendidikan Non Formal**		
	- Angka Lulusan SMP sederajat	% **99.94**	% **99.95**	% **99.96**		PKBM	**80**	% **82.06**	% **80.81**	% **81.61**	PKBM	**80**	**64**
	- Angka Lulusan SMA sederajat	% **99.93**				LKP	**70**	% **74.42**			LKP	**70**	**70**
	- Angka Lulusan SMK sederajat	% **99.77**						% **77.38**					
					1.1.1.1.3. Meningkatnya mutu dan relefansi pendidikan	**1.1.1.1.3.0. Angka Harapan Lama Sekolah**	**12.52**				**1.1.1.1.3.0. Angka Harapan Lama Sekolah**	**12.52**	**12.57**
	- Angka Melanjut kan SD ke SMP	% **90.01**	% **90.03**	% **90.05**				% **108.82**	% **108.97**	% **110.66**			

(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)		(10)	(11)	(12)	(12)		
					1.1.1.1.3.1. Angka Putus Sekolah :					**1.1.1.1.3.1. Angka Putus Sekolah :**		
	- Angka Putus Sekolah SD Sederajat	% **2.26**	% **2.25**	% **2.24**	APS SD %	**0.01**	% **0.10**	% **0.10**	% **0.10**	APS SD %	**0.01**	**0.00**
	- Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	% **0.2**	% **0.19**	% **0.18**	APS SMP %	**0.19**	% **0.29**	% **0.24**	% **0.20**	APS SMP %	**0.19**	**0.14**
	- Angka Putus Sekolah SMA Sederajat	% **0.6**					% **0.56**					
	- Angka Putus Sekolah SMK Sederajat	% **0.14**			**1.1.1.1.3.2. Angka Lulusan :**		% **0.02**			**1.1.1.1.3.2. Angka Lulusan**		
					SD (%)	100				SD (%)	100	**98.96**
	- Rata-rata Nilai UN/US SD	77.55	78.00	78.33	SMP (%)	**99.97**	74.1	76.63	77.80	SMP (%)	**99.97**	**95.53**
	- Rata-rata Nilai UN/US SMP	28.00	28.50	29.00	Paket A setara SD (%)	95	52.8	58.94	58.70	Paket A setara SD (%)	95	95
					Paket B setara SMP (%)	95				Paket B setara SMP (%)	95	95
3	Meningkatnya mutu tenaga pendidik				Paket C setara SMA (%)	**80**				Paket C setara SMA (%)	**80**	**92.90**
	- Angka Guru Layak Mengajar :				Lembaga Kursus dan Pelatihan (%)	100				Lembaga Kursus dan Pelatihan	100	100
	PAUD	% **61.80**	% **62.30**	% 62.80	**1.1.1.1.3.3. Angka Melanjutkan :**		%	% 71.63	% 73.36	**1.1.1.1.3.3. Angka Melanjutkan :**		
	SD	% **82.50**	% **83.00**	% **83.50**	SD ke SMP (%)	**100**	% **94.05**	% **95.42**	% **96.86**	SD ke SMP (%)	**100**	**82.99**
	SMP	% **96.50**	% **97.00**	% **97.50**			% **96.46**	% **97.27**	% **97.93**			
	SMA	% **97.00**			**2.1.1.1.1.1. Guru Layak Mengajar :**		% **98.78**			**2.1.1.1.1.1. Guru Layak Mengajar :**		
	SMK	% **95.51**			TK %	**71.92**	% **97.00**			TK %	**71.92**	**77.18**

(1)	(4)	(6)		(7)		(8)		(8)		(10)		(11)		(12)		(12)		
								SD (%)	**97.00**							SD (%)	**97.00**	**97.06**
								SMP (%)	**98.20**							SMP(%)	**98.20**	**97.63**
4	Meningkatnya mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan :																	
	Terakreditasi							**2.1.1.1.1.1. Rasio Guru per Siswa :**								**2.1.1.1.1.1. Rasio Siswa per Guru :**		
	PAUD	%	-	%	-	%	-	TK	1:15.7	%	-	%	-	%	-	TK	15.7	10
	SD	%	99.95	%	99.96	%	99.97	SD	**23**	%	99.95	%	97.70	%	97.70	SD	**23**	**21**
	SMP	%	98.00	%	98.50	%	99.00	SMP	**17**	%	98.00	%	85.00	%	89.10	SMP	**17**	**15**
	Rasio Guru /Siswa :																	
	SD	%	22.00	%	21.00	%	20.00	**3.1.1.1.1.1. Ketersediaan Ruang Kelas Baik :**		%	20.00	%	21.00	%	20.00	**3.1.1.1.1.1. Ketersediaan Ruang Kelas Baik :**		
	SMP	%	16.00	%	18.00	%	20.00	TK %	**60.36**	%	16.00	%	15.00	%	15.00	TK %	**60.36**	**90.22**
								SD (%)	**70.42**							SD (%)	**70.42**	**59.27**
	Rasio Siswa Per Kelas							SMP (%)	**80.5**							SMP(%)	**80.5**	**75.54**
	SD	30.66	Siswa	31.33	Siswa	32.00	Siswa			27.00	Siswa	22.00	Siswa	26.00	Siswa			
	SMP	31.66	Siswa	33.83	Siswa	36.00	Siswa	**3.1.1.1.1.2. Akreditasi Sekolah :**		29.00	Siswa	32.00	Siswa	31.00	Siswa	**3.1.1.1.1.2. Akreditasi Sekolah :**		
	SMA	35.66	Siswa					TK	**72.59**	37.00	Siswa					TK	**72.59**	
	SMK	36.33	Siswa					SD (%)	**98.00**	33.00	Siswa					SD (%)	**98.00**	**97.60**
								SMP (%)	**87.58**							SMP(%)	**87.58**	**82.50**

(1)	(4)	(6)		(7)		(8)			(8)		(10)		(11)		(12)		(12)		
	Rasio Kelas Per Ruang Kelas								**4.1.1.1.1.1. Indek Kepuasan Masyarakat :**								**4.1.1.1.1.1. Indek Kepuasan Masyarakat :**		
	SD	%	**1.25**	%	1.24	%	1.24	1.1.1.1.4. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajeman pendidikan	SD	**79.55**	%	1.24	%	1.50	%	1.28	SD	**79.55**	**80.97**
	SMP	%	**1.37**	%	1.35	%	1.35		SMP	**77.77**	%	1.17	%	1.02	%	1.02	SMP	**77.77**	**79.95**
	SMA	%	**0.93**						**4.1.1.1.1.2. Menajeman Berbasis Sekolah**		%	1.22					**4.1.1.1.1.2. Menajeman Berbasis Sekolah**		
	SMK	%	**1.09**						PAUD (%)	**100**	%	1.14					PAUD (%)	**100**	**100**
									SD (%)	**100**							SD (%)	**100**	**100**
	Rasio Siswa Per Sekolah :								SMP (%)	**100**							SMP(%)	**100**	**100**
	SD	236	Siswa	238	Siswa	238	Siswa				219	Siswa	219	Siswa	215	Siswa			
	SMP	524	Siswa	532	Siswa	532	Siswa				425	Siswa	421	Siswa	415	Siswa			
	SMA	506	Siswa								498	Siswa							
	SMK	515	Siswa								482	Siswa							
	Ruang Kelas keadaan Baik :																		
	PAUD	%	**66.70**	%	**67.20**	%	**68.20**				%		%	86.00	%	87.77			
	SD	%	**73.00**	%	**74.00**	%	**75.00**				%	**66.39**	%	**65.82**	%	**64.60**			
	SMP	%	**79.30**	%	**79.64**	%	**80.00**				%	**81.35**	%	**79.38**	%	**80.36**			
	SMA	%	**81.92**								%	**79.24**							
	SMK	%	**89.47**								%	**92.15**							
5	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajeman pendidikan .																		
	Manajemen Berbasis Sekolah																		
	SD	%	**100**	%	100.00	%	100.00				%	100.00	%	100.00	%	100.00			

(1)	(4)	(6)	(7)	(8)		(8)	(10)	(11)	(12)	(12)	
	SMP	% **100**	% 100.00	% 100.00			% 100.00	% 100.00	% 100.00		
	SMA	% **100**					% 100.00				
	SMK	% **100**					% 100.00				
6	Meningkatnya peran serta masyarkat terhadap dunia pendidikan dengan peran aktif komite sekolah										
	SD	% **100**	% 100.00	% 100.00			% 100.00	% 100.00	% 100.00		
	SMP	% **100**	% 100.00	% 100.00			% 100.00	% 100.00	% 100.00		
	SMA	% **100**					% 100.00				
	SMK	% **100**					% 100.00				

Catatan : * SMA, SMK kewenangan Provinsi

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD (IKK/IKU) DINAS PENDIDIKAN

Periode: Sampai dengan bulan Desember 2020

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja		Rasio (%)	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.1.1.	**Meningkatnya kemampuan membaca**	790.463.200	157.644.083	785.288.365	99,35	
		(IKK/IKU)-Angka Melek Huruf (Non Kumulatif)	96 Prosen	0,000	99.800	103,96	
		(IKK/IKU)-Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa (Non Kumulatif)	76 Prosen	0,000	65.590	86,30	
2	1.1.2.	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan**	254.382.054.343	4.914.249	8.802.346.681	3,46	
		(IKK/IKU)-Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Non Kumulatif)	6.78 Tahun	0,000	6.740	99,41	
3	1.1.3.	**Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan**	47.949.269.900	618.905.771	38.681.785.154	80,67	
		(IKK/IKU)-Harapan Lama Sekolah (HLS) (Non Kumulatif)	12.52 Tahun	0,000	12.570	100,40	
4	1.1.4.	**Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan**	6.621.664.500	848.953.866	5.874.728.542	88,72	
		(IKK/IKU)-Manajeman Bebasisa Sekolah	100 Prosen	0,000	100.000	100	

		(Non Kumulatif)					
		(IKK/IKU)-Indek Kepuasan Masyarakat (Non Kumulatif)	78.30 Point	0,000	80.460	102,76	

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, berasal dari APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020. Realisasi dana pada anggaran yang tersebut diatas tidak 100 % dikarenakan adanya sisa lelang dan efisiensi anggaran karena penyesuaian kebutuhan belanja.

E. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT CAPAIAN SASARAN

Evaluasi dan Analisis Efesiensi dan Efektifitas Kegiatan

Dinas Pendidikan pada tahun 2020 telah melaksanakan berbagai kegiatan dari berbagai sumber anggaran, untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan evaluasi dan analisis dengan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efesiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Infut}}{\text{Realisasi output}} \text{X } 100\%$$

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan outputnya baik rencana maupun realisasinya. Efektifitas umumnya ditandai dengan berfungsinya seluruh output pada tingkat outcome.

Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi outcome}}{\text{Realisasi output}} \times 100\%$$

Adapun standar pencapaian tingkat efesiensi dan efektifitas suatu kegiatan adalah sebagai berikut:

> 100% = Efesien/Efektif

< 100% = Inefesien/Inefektif

= 100% = Sesuai harapan

Tabel Efesiensi dan Efektifitas Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2020

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	INPUT				OUTPUT						OUTCOME		
				TARGET	REALISASI	SISA	%	TOLAK UKUR	TARGET		REALISASI		%	TOLAK UKUR	TARGET %	REALISASI %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		JUMLAH TOTAL		**309.743.451.943,00**	**63.603.895.163,00**	**246.139.556.780,00**	**20,53**		**64654**		**57436**		**86,79**		**83**	**97,42**
		01.Program Pelayanan Administrsi Perkantoran		**1.826.947.700,00**	**1.735.658.365,00**	**91.289.335,00**	**95,47**		**15184**		**13555**		**98**		**78,3**	**100**
1	Sekretariat	01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	407.752.000,00	341.292.665,00	66.459.335,00	83,70	Jasa komunikasi, air dan listrik	42	Unit	42	Unit	100	Dimanfaatkannya jasa komunikasi, air dan listrik	78,3	100
2	Sekretariat	01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	59.700.000,00	59.700.000,00	-	100	Surat tanda Nomor Kendaraan /STNK	278	Unit	281	Unit	100	Kendaraan layak pakai	78,3	100
3	Sekretariat	01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	494.658.600,00	494.658.600,00	-	100	Alat Tulis Kantor	1050	Paket	1050	Paket	100	Dimanfaatkannya ATK untuk keperluan Administrasi Perkantoran	78,3	100
4	Sekretariat	01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	252.491.100,00	244.491.100,00	8.000.000,00	96,83	Barang Cetakan dan Penggandaan	1045	Paket	1045	Paket	100	Dimanfaatkannya Barang Cetakan untuk Menunjang Administrasi Perkantoran	78,3	100
5	Sekretariat	01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	68.772.000,00	68.772.000,00	-	100	Komponen instalasi listrik	126	Unit Kerja	126	Unit Kerja	100	Dimanfaatkannya komponen instalasi listrik	78,3	100

6	Sekretariat	01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	190.284.000,00	190.284.000,00	-	100	Surat kabar berskala Nasional, Regional dan Lokal	12600	Exp	10968	Exp	87,05	Dimanfaatkannya surat kabar (Dibaca untuk menambah wawasan pengetahuan peraturan perundang-undangan)	78,3	100
7	Sekretariat	01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	01.17 Penyediaan makanan dan minuman	273.460.000,00	268.620.000,00	4.840.000,00	98,23	Makanan dan Minuman untuk rapat-rapat kedinasan	42	Unit Kerja	42	Unit Kerja	100	Dimanfaatkannnya makanan dan minuman sebagai Penunjang Kelancaran Kegiatan Kantor	78,3	100
8	Sekretariat	01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	79.830.000,00	67.840.000,00	11.990.000,00	84,98	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	100	Mengikuti Rakor dan Konsultasi Luar Daerah	78,3	100
		02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**3.372.747.300,00**	**3.323.176.910,00**	**49.570.390,00**	**98,62**		**386**		**438**		**100**		**78,3**	**100,00**
9	Sekretariat	02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	02.03 pembangunan gedung kantor	425.166.000,00	**417.968.000,00**	**7.198.000,00**	98,31	Pembangunan gedung	1	Paket	1	Paket	100	Pelayanan pendidikan berjalan lancar	78,3	100
10	Sekretariat	02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	246.750.000,00	234.828.000,00	**11.922.000,00**	95,17	Perlengkapan gedung kantor	6	Unit	55	Unit	100	Dimanfaatkannya perlengkapan kantor untuk kegiatan dinas	78,3	100
11	Sekretariat	02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	02.11 Sewa tanah/gedung	155.485.300,00	155.485.300,00	-	100	Sewa tanah untuk TK, SD, SMP, dan UPT SKB	15	Lokal	15	Lokal	100	Dimanfaatkannya tanah untuk sarana pendidikan	78,3	100
12	Sekretariat	02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	02.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1.150.666.000,00	1.121.953.610,00	28.712.390,00	97,50	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	42	Unit	42	Unit	100	Gedung layak pakai	78,3	100
13	Sekretariat	02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	913.600.000,00	913.600.000,00	-	100	Bahan bakar	278	Unit	281	Unit	100	Kendaraan layak pakai	78,3	100

14	Sekretariat	02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	02.28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	200.500.000,00	200.500.000,00	-	100	Peralatan gedung kantor	42	Unit Kerja	42	Unit Kerja	100	Peralatan gedung kantor terawat / kondisi baik	78,3	100
15	Sekretariat	02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	280.580.000,00	278.842.000,00	1.738.000,00	99,38	Rehabilitasi gedung kantor	2	Lokal	2	Lokal	100	Dimanfaatkannya kantor korwil untuk kegiatan pelayanan pendidikan	78,3	100
		05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**432.163.600,00**	**420.958.941,00**	**11.204.659,00**	**97,41**		**1**		**1**		**100**		**78,3**	**100**
16	Bidang SMP	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	05.11 Peningkatan Pengelolaan Aset	432.163.600,00	420.958.941,00	11.204.659,00	97,41	Dokumen bimbingan teknis pengelolaan aset barang milik daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Data aset sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	78,3	100
		06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan		**44.612.000,00**	**44.612.000,00**	**-**	**100,00**		**3**		**3**		**100**		**100**	**100**
17	Sekretariat	06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	44.612.000,00	44.612.000,00	-	100	Dokumen laporan daya serap keuangan	3	Dokumen	3	Dokumen	100	Laporan daya serap keuangan sebagai dasar pengambilan kebijakan	100	100
		07 Program pengembangan sistem perencanaan sektoral		**17.637.500,00**	**12.187.500,00**	**5.450.000,00**	**69,10**		**8**		**8**		**100**		**78,3**	**100**
18	Sekretariat	07 Program pengembangan sistem perencanaan sektoral	07.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	17.637.500,00	12.187.500,00	5.450.000,00	69,10	Dokumen Renstra Tahun 2019-2024, Dokumen renstra, renja, dan RKT, Dokumen perencanaan pembangunan pendidikan	8	Dokumen	8	Dokumen	100	Renstra sebagai dasar perencanaan program	78,3	100
		15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		**2.462.394.900,00**	**2.434.877.570,00**	**27.517.330,00**	**99,40**		**24965**		**23035**		**56**		**63,09**	**80,70**

19	PAUD	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	394.450.000,00	394.450.000,00	-	100	Ruang kelas baru (RKB)	3	Lokal	2	Lokal	67	Dimanfaatkannya RKB untuk kegiatan pembelajaran	60,35	100
20	PAUD	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.15 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	666.298.400,00	657.528.375,00	8.770.025,00	98,68	Buku Raport dan ijazah PAUD/TK	23000	Exp	23000	Exp	100	Dimanfaatkannya buku raport untuk laporan evaluasi belajar siswa	50	100
21	PAUD	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15,20 Pengadaan perlengkapan sekolah	79.323.000,00	77.473.000,00	1.850.000,00	97,67	Alat praktik dan peraga siswa untuk PAUD/TK	10	Paket	10	Paket	100	Sarana KBM sekolah terpenuhi	50	100
22	PAUD	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	421.700.000,00	421.700.000,00	-	100	Ruang kelas / penunjang pembelajaran dalam kondisi baik	3	Lokal	5	Lokal	100	Dimanfaatkannya ruang kelas yang layak untuk kegiatan pembelajaran	60,35	100
23	PAUD	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	1.692.800,00	1.692.800,00	-	100	Juara I, II, III Lomba guru TK, pengawas TK, dan kepala TK berprestasi tingkat kabupaten	1	Paket kegiatan	0	Paket kegiatan	0	Meningkatnya motivasi dan kompetensi guru menuju guru yang profesional	68	68
24	PAUD	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini	33.776.800,00	33.776.800,00	-	100	Dokumen model bahan ajar	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Meningkatnya motivasi dan kompetensi siswa-siswi PAUD di Kabupaten Cirebon	60,35	60,35
25	PAUD	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.62 Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	624.300,00	624.300,00	-	100	Sertifikat Peserta Bintek kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	500	Exp	0	Exp	0	Dapat menyusun kurikulum PAUD, dapat Meningkatkan kompetensi sesuai peraturan perundangan	68	68
26	PAUD	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.64 Perencanaan dan Penyusunan Program PAUD	780.700,00	780.700,00	-	100	Penyusunan dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan PAUD	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen perencanaan PAUD sebagai bahan penetapan kebijakan	68	68

27		15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	150.249.900,00	148.352.595,00	1.897.305,00	98,74	Jumlah peserta sosialisasi program bantuan operasional pendidikan PAUD terhadap kepala sekolah	750	Orang	0	Orang	0	Dokumen sosialisasi program bantuan operasional pendidikan PAUD terhadap kepala sekolah	68	68
28	PAUD	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.67 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	656.400.000,00	641.400.000,00	15.000.000,00	97,71	BOP PAUD	16	Unit	16	Unit	100	Penyelenggaraan TK berjalan lancar	68	100
29	PAUD	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.81 Penyelenggaraan Akriditasi Pendidikan Anak Usia Dini	1.909.000,00	1.909.000,00	-	100	Peserta sosialisasi dan pembinaan persiapan sekolah yang akan diakreditasi	380	Orang	0	orang	0	Dokumen Kegiatan Sosialisasi Akreditasi PAUD	68	68
30	PAUD	15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.82 Apresiasi Lembaga dan Gugus	55.190.000,00	55.190.000,00	-	100	Lomba Apresiasi GTK (Guru dan Pengelola/Kepala PAUD) dan Lomba Apresiasi Lembaga PAUD (TK dan Kelompok Bermain)	300	Lembaga PAUD	0	Lembaga PAUD	0	Meningkatnya motivasi dan kompetensi guru PAUD dan lembaga PAUD di Kabupaten Cirebon	68	68
		16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		**297.117.921.443,00**	**51.674.027.157,00**	**245.443.894.286,00**	**89,52**		**10184**		**7173**		**63,96**		**84,56**	**93,55**
31	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.01 Pembangunan gedung sekolah SD	**252.089.300,00**	**251.299.300,00**	790.000,00	99,69	Ruang guru baru	**1**	Unit	**1**	Unit	100	Dimanfaatkannya ruang guru untuk kegiatan guru	**100**	**100**
32	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD	3.097.153.300,00	3.093.498.116,00	3.655.184,00	99,88	Jumlah ruang kelas baru SD	112	Lokal	12	Lokal	10,71	Dimanfaatkannya RKB untuk kegiatan pembelajaran	100	100
33	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan tempat parkir SD	4.284.687.800,00	4.266.831.300,00	17.856.500,00	99,58	Pavingisasi dan Pemagaran	76	Lokasi	39	Lokasi	51,32	Lingkungan sekolah aman dan rapih	60	100
34	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.12 Pembangunan perpustakaan sekolah SD	8.190.024.600,00	7.969.584.600,00	220.440.000,00	97,31	Ruang perpustakaan sekolah	53	Lokal	8	Lokal	15,09	Dimanfaatkannya ruang perpustakaan untuk menunjang kegiatan pembelajaran	60	100

35	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SD	2.357.734.700,00	2.346.076.800,00	11.657.900,00	99,51	Tersedianya sarana air bersih, sanitasi dan MCK	68	SD	23	SD	33,82	Dimanfaatkannya sarana air bersih, sanitasi dan MCK untuk menunjang kebersihan dan lingkungan sekolah sehat	60	100
36	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.15 Pembelian buku-buku dan alat tulis siswa SD	542.657.500,00	424.759.000,00	117.898.500,00	78,27	Buku referensi, buku dan alat tulis siswa dan raport siswa	1	Paket	1	Paket	100	Dimanfaatkannya Buku Raport, ijazah dan buku Baca Tulis Qur'an untuk siswa	60	100
37	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD	3.352.649.800,00	3.324.297.400,00	28.352.400,00	99,15	Alat praktik peraga siswa	115	Paket	71	Paket	61,74	Dimanfaatkannya peraga untuk menunjang pembelajaran	60	100
38	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.19 Pengadaan Mebeleur Sekolah SD	2.365.594.300,00	2.354.607.123,00	10.987.177,00	99,54	Meubeleur	175	Lokal	32	Lokal	18,29	Dimanfaatkannya meubeleur untuk menunjang kegiatan pembelajaran	60	100
39	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD	11.293.529.500,00	11.249.444.016,00	44.085.484,00	99,61	Rehab ruang kelas	400	Lokal	125	Lokal	31,25	Dimanfaatnya ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran	70,42	100
40	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD	111.205.200,00	24.888.100,00	86.317.100,00	22,38	Peserta lomba pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	9	Orang	9	Orang	100	Terpilihnya juara I, II, III PTK berprestasi tingkat Kabupaten Cirebon.	100	100
41	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD.	246.787.537.243,00	2.340.677.720,00	244.446.859.523,00	0,95	Dokumen bimbingan teknis dan laporan hasil monev BOS	2	Dokumen	2	Dokumen	100	Angka partipasi kasar SD meningkat	100	100
						-		Dokumen bimbingan teknis dan laporan hasil monev pelaksanaan BOS SD	2	Dokumen	2	Dokumen	100	Angka partipasi murni SD/MI/paket A meningkat	100	100

42	PNF	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.68 Penyelenggaraan Paktet B Setara SMP	987.196.700,00	986.059.030,00	1.137.670,00	99,88	Lulusan kesetaraan paket B setara SMP	1250	Orang	1250	Orang	100	Jumlah lulusan kesetaraan paket B setara SMP	99,97	100
43	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajeman sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar SD	83.000.000,00	83.000.000,00	-	100,00	Lomba gugus dan perpustakaan	6	Orang	6	Orang	100	Terpilihnya juara I, II, III lomba gugus dan perpustakaan	100	100
44	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SD	358.139.200,00	127.856.900,00	230.282.300,00	35,70	Peserta lomba OSN, O2SN, FLSN, calistung, Pasanggiri	55	Lomba	9	Lomba	16,36	Terpilihnya juara I, II, III	100	100
45	BIDANG SMP	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.72. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (SMP)	86.660.000,00	86.660.000,00	-	100	Peserta bimtek guru TIK	500	Orang	482	Orang	96,40	Peserta bimtek dapat mengembangkan materi belajar dengan menggunakan TIK	99,97	100
46	BIDANG SMP	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.75 Penyediaan bea siswa transisi (SMP)	19.776.600,00	19.233.365,00	543.235,00	97,25	Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu	1500	Orang	0	Orang	0	Siswa kurang mampu menerima beasiswa	100	0
47	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar (SD)	142.289.000,00	137.489.000,00	4.800.000,00	96,63	Dokumen materi sosialisasi dan penilaian kinerja kepala sekolah	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Tersusunnya dokumen untuk penilaian akriditasi sekolah	70,42	100
48	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.78 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SD)	127.944.800,00	127.413.510,00	531.290,00	99,58	Dokumen hasil monev UN/US SD	928	Sekolah	928	Sekolah	100	Peserta melaksanakan US/UN	100	100

49	BIDANG SD	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.79 Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil (SD)	1.532.018.500,00	1.478.901.320,00	53.117.180,00	96,53	Guru SD di daerah terpencil penerima tunjangan	48	Orang	98	Orang	100	Proses pembelajaran di sekolah berjalan lancar	100	100
50	BIDANG PNF	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.83 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik paket B setara SMP	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100	Peserta workshop pembelajaran paket B	100	Orang	100	Orang	100	Tutor mampu menyusun kurikulum dan bahan ajar Kesetaraan paket B	99,97	100
51	SEKRETARIAT	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.84 Bimbingan teknis penataan penilaian angka kridit fungsional	180.583.400,00	175.841.732,00	4.741.668,00	97,37	Sertifikat bimtek untuk peserta pelatihan	2500	Exp	2500	Exp	100	Tenaga fungsional tahu dan mampu dalam penetapan angka kredit nya	99,97	100
52	BIDANG SMP	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.85 Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	1.877.851.200,00	1.877.851.200,00	-	100	Ruang Kelas Baru (RKB)	80	Lokal	6	Lokal	7,5	Dimanfaatkannya RKB untuk kegiatan pembelajaran	100	100
53	BIDANG SMP	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.87 Pembangunan taman, lapangan upacara dan lapangan parkir SMP	400.000.000,00	385.579.600,00	14.420.400,00	96,39	Pagar lingkungan sekolah, terpasang paving blok	10	Lokal	2	Lokal	20	Lingkungan sekolah aman dan rapih	60	100
54	BIDANG SMP	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.89 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	1.124.981.200,00	1.124.981.200,00	-	100	Jamban siswa dan sarana air bersih	400	Unit	9	Unit	2,25	Ketersediaan Sanitary yang layak	60	100
55	BIDANG SMP	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.90 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP	443.153.200,00	343.818.730,00	99.334.470,00	77,58	Buku referensi, pengayaan panduan pendidikan dan raport siswa	1	Paket	1	Paket	100	Tersedianya tolak ukur hasil belajar bagi siswa	60	100

56	BIDANG SMP	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.91 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP	1.788.104.600,00	1.770.177.400,00	17.927.200,00	99,00	Alat praktik peraga siswa penunjang KBM	1	Paket	6	Paket	100	Dimanfaatkannya alat peraga pendidikan untuk menunjang pembelajaran	60	100
57	BIDANG SMP	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.94 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	3.691.230.000,00	3.664.700.600,00	26.529.400,00	99,28	Ruang kelas SMP	160	Lokal	29	Lokal	18,13	Dimanfaatnya ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran	80,5	100
58	BIDANG SMP	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.95 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	19.776.600,00	19.233.365,00	543.235,00	97,25	Tenaga kependidikan berprestasi	209	Orang	0	Orang	0	Terpilihnya juara I, II, III guru berprestasi tingkat Kabupaten Cirebon.	100	0
59	BIDANG SMP	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.97 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMP/MTs/SMPLB serta Pesantren Salafiah dan satian pendidikan non islam setara SMP	1.480.800.000,00	1.480.800.000,00	-	100	Pengawas ruangan	1234	Orang	1234	Orang	100	Pengelolaan dana BOS sesuai aturan	100	100
60	BIDANG SMP	16.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.101 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMP	39.553.200,00	38.466.730,00	1.086.470,00	97,25	Pelaksanaan US/UN SMP	187	Sekolah	187	Sekolah	100	Pelaksanaan US/UN SMP terlaksana	100	100
		18.Program Pendidikan Non Formal		**3.188.196.100,00**	**2.888.513.295,00**	**299.682.805,00**	**97,06**		**4100**		**4100**		**100**		**79,43**	**100**
61	BIDANG PNF	18.Program Pendidikan Non Formal	18.01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	99.513.100,00	99.513.100,00	-	100	Peserta bintek pengelolaan LKP	100	Orang	100	Orang	100	LKP melaksanakan pembelajaran sesuai aturan	70	100
62	BIDANG PNF	18.Program Pendidikan Non Formal	18.04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	790.463.200,00	785.288.365,00	5.174.835,00	99,35	Warga Belajar Keaksaraan Fungsional	2250	WB	2250	WB	100	Masyarakat penyandang buta aksara mendapatkan pelayanan pendidikan	96	100

63	BIDANG PNF	18.Program Pendidikan Non Formal	18.09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan nonformal	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100	Jumlah Peserta bimtek dan workshop penyusunan kurikulum dan bahan ajar mendapatkan sertifikat tutor paket A	100	Orang	100	Orang	100	Peningkatan capaian angka lulusan kesetaraan paket A setara SD	80	100
								Jumlah Peserta bimtek dan workshop penyusunan kurikulum dan bahan ajar mendapatkan sertifikat tutor paket B	100	Orang	100	Orang	100	Peningkatan capaian angka lulusan kesetaraan paket B setara SMP	70	100
								Jumlah Peserta bimtek dan workshop penyusunan kurikulum dan bahan ajar mendapatkan sertifikat tutor paket C	100	Orang	100	Orang	100	Peningkatan capaian angka lulusan kesetaraan paket C setara SMA	80	100
64	BIDANG PNF	18.Program Pendidikan Non Formal	18. 21 Penyelenggaraan paket C setara SMU	2.098.885.000,00	1.804.377.030,00	294.507.970,00	85,97	Lulusan kesetaraan paket C setara SMA	1350	Orang	1350	Orang	100	Warga masyarakat putus sekolah mendapatkan pelayanan Pendidikan paket C	80	100
65	BIDANG PNF	18.Program Pendidikan Non Formal	18.22 Pelatihan kompetensi pendidik paket C	99.334.800,00	99.334.800,00	-	100	Peserta Bintek tutor paket C	100	Orang	100	Orang	100	Tutor mampu melaksanakan pembelajaran sesuai aturan dan peningkatan angka lulusan pendidikan paket C	80	100
		20.Program Peningkatan Mutu Pendidi dan Tenaga Kependidikan		**353.275.000,00**	**284.069.700,00**	**69.205.300,00**	**75,19**		**9817**		**9117**		**50,00**		**91,18**	**100**
66	Sekretariat	20.Program Peningkatan Mutu Pendidi dan Tenaga Kependidikan	20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi PTK	136.633.900,00	71.228.700,00	65.405.200,00	52,13	Peserta Bintek aplikasi Dapodikdasmen	350	Orang	80	Orang	22,86	Prosentase guru yang memiliki kualifikasi S1 pada jenjang TK/PAUD	72,5	100

								Peserta Bintek aplikasi Dapodikdasmen	350	Orang	80	Orang	22,86	Prosentase guru yang memiliki kualifikasi S1 pada jenjang SD	97	100
								Peserta Bintek aplikasi Dapodikdasmen	350	Orang	190	Orang	54,29	Prosentase guru yang memiliki kualifikasi S1 pada jenjang SMP	98,2	100
67	Sekretariat	20.Program Peningkatan Mutu Pendidi dan Tenaga Kependidikan	20.15 Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependudukan	216.641.100,00	212.841.000,00	3.800.100,00	98,25	PTK terevaluasi	8767	Orang	8767	Orang	100	Prosentase guru yang memiliki kualifikasi S1 meningkat	97	100
		22.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		**927.556.400,00**	**785.813.725,00**	**141.742.675,00**	**85,33**		**6**		**6**		**100**		**94,89**	**100**
68	Sekretariat	22.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	22.04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	228.296.800,00	177.675.000,00	50.621.800,00	77,83	Dokumen Capaian IKM SD	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen IKM sebagai dasar pengambilan kebijakan	79,55	100
69	Sekretariat	22.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	22.07 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	425.001.500,00	354.580.625,00	70.420.875,00	83,43	Dokumen profil pendidikan	3	Dokumen	3	Dokumen	100	Profil pendidikan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan	100	100
70	Sekretariat	22.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	22.16 Penyusunan capaian target SPM bidang pendidikan	94.258.100,00	77.558.100,00	16.700.000,00	82,28	Dokumen hasil capaian SPM bidang pendidikan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Laporan kinerja SPM dijadikan dasar pengambilan kebijakan	100	100
71	BIDANG SMP	22.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	22.19 Fasilitasi pelayanan pendidikan(SMP)	180.000.000,00	176.000.000,00	4.000.000,00	97,78	Dokumen laporan hasil PPDB online	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Memahami juknis PPDB online dan tersedianya peralatan komputer	100	100

Dari Table Diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan perhitungan efesiensi dan efektifitas kegiatan didapat bahwa tingkat efesiensi dan efektifitas dari 71 kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020 yaitu:

a. Efektif dan Efisien. Yaitu realisasi input < 100% namun realisai output dan outcome mencapai 100%.

   Sebanyak 45 kegiatan masuk dalam katagori efektif dan efisien (80,00 %). Kegiatan tersebut tersebar pada program administrasi perkantoran 4 kegiatan, program peningkatan sarana prasarana aparatur 4 kegiatan, Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparataur 1 kegiatan, Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 1 Kegiatan, Program Pendidikan Anak Usia Dini 4 kegiatan, program wajar dikdas sembilan tahun 23 kegiatan, program pendidikan non formal dan informal 2 kegiatan, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 2 kegiatan, program manajemen pelayanan pendidikan 4 kegiatan.

b. Efisien. Yaitu realisasi input, output dan outcome mencapai 100%.

   Sebanyak 21 kegiatan masuk dalam katagori efisien (30 %). Kegiatan tersebut meliputi 4 kegiatan pada program administrasi perkantoran; program peningkatan sarana prasarana aparatur 3 kegiatan; 1 kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4 kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini; 6 kegiatan pada program wajar dikdas sembilan tahun; 3 kegiatan pada program pendidikan non formal dan informal.

c. In Efisien. Yaitu realisasi input lebih besar daripada realisasi output dan outcome.

   Sebanyak 5 kegiatan termasuk katagori in efisien (1,80 %) yaitu berada pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebanyak 1 kegiatan dan 4 kegiatan pada program pendidikan anak usia dini.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2020 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan. Rata-rata capaian Kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2020 menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut : 89,75% Mencapai target/meningkat dan 10,45% tidak mencapai target.

Pada dasarnya tugas-tugas yang diemban oleh Dinas pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 sesuai yang ditetapkan dalam rencana strategis telah dapat memenuhi fungsi sebagai Lembaga yang memiliki fungsi pengelolaan pendidikan.

Fungsi utama yang harus dilaksanakan lembaga ini adalah sebagai penyelenggaraan kegiatan operasional dibidang pendidikan telah berjalan dengan semestinya dan tidak mendapat hambatan yang berarti (berjalan lancar). Indikator dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa realisasi keuangan mencapai 20,53% dan realisasi fisik mencapai 86,79%. Dengan adanya kegiatan tersebut terdapat peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana sehingga memperlancar proses belajar mengajar diseluruh jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.

Disadari atau tidak, kekurangan pasti ada. Namun hal tersebut dapat dijadikan bahan introspeksi diri guna perbaikan terhadap sesuatu yang dirasa masih kurang dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang sudah baik yang telah dicapai oleh Dinas pendidikan Kabupaten Cirebon.

---------- *** ----------

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2020

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

Lamp: II/5-5

No.	Sasaran		Penjelasan	Satuan	Target	Realisasi	(%) Capaian
	Uraian	Indikator					
1	Meningkatnya Kemampuan Membaca	**ANGKA MELEK HURUF**	Jumlah Penduduk ≥ 15 th dapat membaca/jml penduduk ≥ 15 th.	%	96	99,73	103,89
		MELEK HURUF AL-QUR'AN					
		SD	Jumlah siswa SD dapat membaca Al-Qur'an/Jumlah siswa SD	%	76	72,86	95,87
		SMP	Jumlah siswa SMP dapat membaca Al-Qur'an/Jumlah siswa SMP	%	59,55	86,46	145,19
2	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	Jumlah tahun ijazah penduduk ≥ 15 th/Jumlah penduduk ≥ 15 th.	%	6,78	6,74	99,41
		APK					
		APK PAUD	Jumlah siswa	%	66,80	42,03	62,92
			TK/PAUD dibagi dengan Jumlah				
			penduduk kelompok usia 4-6 thn) x 100%				
		APK SD/MI	Jumlah siswa	%	115,00	116,22	101,06
			SD/MI/Paket A dibagi dengan Jumlah				
			penduduk kelompok usia 7-12 thn) x 100%				
		APK SMP/MTs	Jumlah siswa	%	113,00	157,08	139,01
			SMP/MTs/Paket B dibagi dengan Jumlah				
			penduduk kelompok usia 13-15 thn) x 100%				
		APM					
		APM SD/MI	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang	%	100,00	103,75	103,75
			SD/MI/Paket A dibagi dengan Jumlah				
			penduduk kelompok usia 7-12 thn) x 100%				
		APM SMP/MTs	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang	%	98,30	139,56	141,97
			SMP/MTS dibagi dengan Jumlah				
			penduduk kelompok usia 13-15 thn) x 100%				
		RASIO KETERSEDIAAN SISWA PER KELAS (S/K)					
		TK	Jumlah siswa TK dibagi jumlah	%	1:19,50	22	110,00
			ruang kelas pada jenjang yang sama x 100%				
		SD	Jumlah siswa SD dibagi jumlah	S/K	24,00	27,00	88,89
			ruang kelas pada jenjang yang sama x 100%				
		SMP	Jumlah siswa SMP dibagi jumlah	S/K	32,00	22,00	145,45
			ruang kelas pada jenjang yang sama x 100%				
		KETERSEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL					
		PKBM	Jumlah Lembaga Yang Ada		80	64	80,00
		LKP	Jumlah Lembaga Yang Ada		70	70	100,00
3	Meningkatnya Mutu Dan Relefansi Pendidikan	**ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH**	Tahun Lama Sekolah	%	12,52	12,57	100,40
		ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)					
		SD	Jumlah siswa putus sekolah	%	0,01	0,00	0,00
			SD dibagi dengan Jumlah siswa pd				
			jenjang yang sama x 100%				
		SMP	Jumlah siswa putus sekolah	%	0,19	0,14	73,68
			SMP dibagi dengan Jumlah siswa pd				
			jenjang yang sama x 100%				
		ANGKA LULUSAN (AL)					
		SD	Jumlah lulusan pada jenjang SD dibagi	%	100,00	98,96	98,96
			dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada				
			jenjang yang sama tahun ajaran				
			sebelumnya) x 100%				

No.	Sasaran		Penjelasan	Satuan	Target	Realisasi	(%) Capaian
	Uraian	Indikator					
		SMP	Jumlah lulusan pada jenjang SMP dibagi	%	99,97	95,53	95,56
			dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada				
			jenjang yang sama tahun ajaran				
			sebelumnya) x 100%				
		Paket A Setara SD	Jumlah lulusan pada jenjang Paket A Setara SD dibagi	%	95,00	95,00	100,00
			dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada				
			jenjang yang sama tahun ajaran				
			sebelumnya) x 100%				
		Paket B Setara SMP	Jumlah lulusan pada jenjang Paket B Setara SMP dibagi	%	95,00	95,00	100,00
			dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada				
			jenjang yang sama tahun ajaran				
			sebelumnya) x 100%				
		Paket C Setara SMA	Jumlah lulusan pada jenjang Paket C Setara SMA dibagi	%	80,00	92,90	116,13
			dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada				
			jenjang yang sama tahun ajaran				
			sebelumnya) x 100%				
		Lembaga Kursus dan Pelatihan	Jumlah Lembaga Yang Ada	%	100,00	100,00	100,00
		ANGKA MELANJUTKAN					
		SD ke SMP	Jumlah Siswa Baru SMP Sederajat/Jumlah Lulusan SD Sederajat	%	100,00	82,99	82,99
		GURU LAYAK MENGAJAR					
		TK	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV dibagi dengan Jumlah Guru TK seluruhnya pada jenjang yang sama x 100%	%	71,92	77,18	107,31
		SD	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	%	97,00	97,06	100,06
			dibagi dengan Jumlah Guru SD seluruhnya				
			pada jenjang yang sama x 100%				
		SMP	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV	%	98,20	97,63	99,42
			dibagi dengan Jumlah Guru SMP seluruhnya				
			pada jenjang yang sama x 100%				
		RASIO GURU PER SISWA					
		TK	Jumlah Siswa TK/Jumlah guru TK	%	1:15,7	10,00	66,67
		SD	Jumlah Siswa SD/Jumlah guru SD	%	23,00	21,00	91,30
		SMP	Jumlah siswa SMP /Jumlah guru SMP	%	17,00	15,00	113,33
		KETERSEDIAAN RUANG KELAS BAIK					
		TK	Jumlah ruang kelas TK kondisi baik dibagi	%	60,36	90,22	149,47
			jumlah ruang kelas TK				
		SD	Jumlah ruang kelas baik jenjang SD dibagi	%	70,42	59,27	84,17
			jumlah ruang kelas pada jenjang yang sama				
			x 100%				
		SMP	Jumlah ruang kelas baik jenjang SMP dibagi	%	80,50	75,54	93,84
			jumlah ruang kelas pada jenjang yang sama				
			x 100%				
		TERAKREDITASI					
		TK	Jumlah TK terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh TK	%	72,59	64,00	88,17
		SD	Jumlah SD terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh SD	%	98,00	97,60	99,59
		SMP	Jumlah SMP terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh SMP	%	87,58	82,50	94,20
4	Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pendidikan	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**					
		SD	Nilai IKM SD / Jumlah SD	%	79,55	80,97	101,79
		SMP	Nilai IKM SMP / Jumlah SMP	%	77,77	79,95	102,80
		MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH					
		PAUD	Jumlah sekolah yang melaksanakan MBS	%	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran		Penjelasan	Satuan	Target	Realisasi	(%) Capaian
	Uraian	Indikator					
			jenjang SD dibagi jumlah sekolah pada jenjang				
			yang sama x 100%				
		SD	Jumlah sekolah yang melaksanakan MBS	%	100,00	100,00	100,00
			jenjang SD dibagi jumlah sekolah pada jenjang				
			yang sama x 100%				
		SMP	Jumlah sekolah yang melaksanakan MBS	%	100,00	100,00	100,00
			jenjang SMP dibagi jumlah sekolah pada jenjang				
			yang sama x 100%				

REALISASI TAHUN INI DENGAN REALISASI SAMPAI DENGAN REALISASI TAHUN LALU

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	**ANGKA MELEK HURUF**	%	95,53	99,73
	MELEK HURUF AL-QUR'AN			
	SD	%	76,00	72,86
	SMP	%	75,00	86,46
2	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	%	6,62	6,74
	APK			
	APK PAUD	%	65,80	42,03
	APK SD/MI	%	116,52	116,22
	APK SMP/MTs	%	122,27	157,08
	APM			
	APM SD/MI	%	103,32	103,75
	APM SMP/MTs	%	97,88	139,56
	RASIO KETERSEDIAAN SISWA PER KELAS (S/K)			
	TK	%	-	22
	SD	S/K	26,00	27,00
	SMP	S/K	31,00	22,00
	KETERSEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL			
	PKBM		-	64
	LKP		-	70
3	**ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH**	%	12,57	12,57
	ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)			
	SD	%	0,01	0,00
	SMP	%	0,20	0,14
	ANGKA LULUSAN (AL)			
	SD	%	97,47	98,96
	SMP	%	81,04	95,53
	Paket A Setara SD	%	-	95,00
	Paket B Setara SMP	%	-	95,00
	Paket C Setara SMA	%	-	92,90
	Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	-	100,00
	ANGKA MELANJUTKAN			
	SD ke SMP	%	110,66	82,99
	GURU LAYAK MENGAJAR			
	TK	%	73,36	77,18
	SD	%	96,86	97,06
	SMP	%	97,93	97,63
	RASIO GURU PER SISWA			
	TK	%	-	10,00
	SD	%	20,00	21,00
	SMP	%	15,00	15,00
	KETERSEDIAAN RUANG KELAS BAIK			
	TK	%	87,77	90,22
	SD	%	64,60	59,27
	SMP	%	80,36	75,54
	TERAKREDITASI			
	TK	%	88,17	88,17
	SD	%	97,70	97,60
	SMP	%	89,10	82,50
4	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**			
	SD	%	80,56	80,97
	SMP	%	78,92	79,95
	MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH			
	PAUD	%	100,00	100,00
	SD	%	100,00	100,00
	SMP	%	100,00	100,00

REALISASI TAHUN INI DENGAN REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi Akumulasi s/d 2020	Keterangan
1	**ANGKA MELEK HURUF**	%	99,73	99,73	
	MELEK HURUF AL-QUR'AN				
	SD	%	72,86	72,86	
	SMP	%	86,46	86,46	
2	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	%	6,74	6,74	
	APK				
	APK PAUD	%	42,03	42,03	
	APK SD/MI	%	116,22	116,22	
	APK SMP/MTs	%	157,08	157,08	
	APM				
	APM SD/MI	%	103,75	103,75	
	APM SMP/MTs	%	139,56	139,56	
	RASIO KETERSEDIAAN SISWA PER KELAS (S/K)				
	TK	%	22	22	
	SD	S/K	27,00	27,00	
	SMP	S/K	22,00	22,00	
	KETERSEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL				
	PKBM		64	64	
	LKP		70	70	
3	**ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH**	%	12,57	12,57	
	ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)				
	SD	%	0,00	0,00	
	SMP	%	0,14	0,14	
	ANGKA LULUSAN (AL)				
	SD	%	98,96	98,96	
	SMP	%	95,53	95,53	
	Paket A Setara SD	%	95,00	95,00	
	Paket B Setara SMP	%	95,00	95,00	
	Paket C Setara SMA	%	92,90	92,90	
	Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	100,00	100,00	
	ANGKA MELANJUTKAN				
	SD ke SMP	%	82,99	82,99	
	GURU LAYAK MENGAJAR				
	TK	%	77,18	77,18	
	SD	%	97,06	97,06	
	SMP	%	97,63	97,63	
	RASIO GURU PER SISWA				
	TK	%	10,00	10,00	
	SD	%	21,00	21,00	
	SMP	%	15,00	15,00	
	KETERSEDIAAN RUANG KELAS BAIK				
	TK	%	90,22	90,22	
	SD	%	59,27	59,27	
	SMP	%	75,54	75,54	
	TERAKREDITASI				
	TK	%	88,17	88,17	
	SD	%	97,60	97,60	
	SMP	%	82,50	82,50	
4	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**				
	SD	%	80,97	80,97	
	SMP	%	79,95	79,95	
	MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH				
	PAUD	%	100,00	100,00	
	SD	%	100,00	100,00	
	SMP	%	100,00	100,00	

REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2020) DENGAN RENCANA SESUAI RENSTRA

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Akumulasi	Rencana Sesuai Renstra	Keterangan
1	**ANGKA MELEK HURUF**	%	99,73	96	
	MELEK HURUF AL-QUR'AN				
	SD	%	72,86	76,00	
	SMP	%	86,46	59,55	
2	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	%	6,74	6,78	
	APK				
	APK PAUD	%	42,03	66,80	
	APK SD/MI	%	116,22	115,00	
	APK SMP/MTs	%	157,08	113,00	
	APM				
	APM SD/MI	%	103,75	100,00	
	APM SMP/MTs	%	139,56	98,30	
	RASIO KETERSEDIAAN SISWA PER KELAS (S/K)				
	TK	%	22	20	
	SD	S/K	27,00	24,00	
	SMP	S/K	22,00	32,00	
	KETERSEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL				
	PKBM		64	80	
	LKP		70	70	
3	**ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH**	%	12,57	12,52	
	ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)				
	SD	%	0,00	0,01	
	SMP	%	0,14	0,19	
	ANGKA LULUSAN (AL)				
	SD	%	98,96	100,00	
	SMP	%	95,53	99,97	
	Paket A Setara SD	%	95,00	95,00	
	Paket B Setara SMP	%	95,00	95,00	
	Paket C Setara SMA	%	92,90	80,00	
	Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	100,00	100,00	
	ANGKA MELANJUTKAN				
	SD ke SMP	%	82,99	100,00	
	GURU LAYAK MENGAJAR				
	TK	%	77,18	71,92	
	SD	%	97,06	97,00	
	SMP	%	97,63	98,2	
	RASIO GURU PER SISWA				
	TK	%	10,00	15,00	
	SD	%	21,00	23,00	
	SMP	%	15,00	17,00	
	KETERSEDIAAN RUANG KELAS BAIK				
	TK	%	90,22	60,36	
	SD	%	59,27	70,42	
	SMP	%	75,54	80,5	
	TERAKREDITASI				
	TK	%	88,17	72,59	
	SD	%	97,60	98,00	
	SMP	%	82,50	87,58	
4	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**				
	SD	%	80,97	79,55	
	SMP	%	79,95	77,77	
	MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH				
	PAUD	%	100,00	100,00	
	SD	%	100,00	100,00	
	SMP	%	100,00	100,00	